

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN BPSPAMS DALAM PENGELOLAAN PAMSIMAS DI
DESA SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU
KABUPETEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

ARI GUSTI SUTRISNA

NPM : 177310079

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

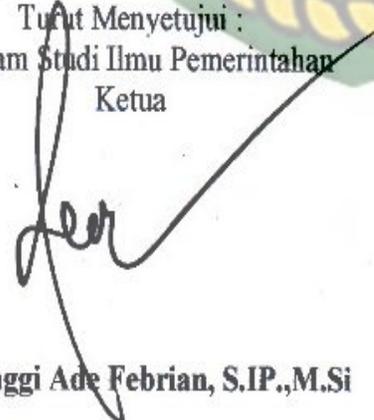
Nama : Ari Gusti Sutrisna
NPM : 177310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa
Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau kabupaten
Bengkalis

Format sitematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Tufut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Andriyus, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ari Gusti Sutrisna
NPM : 177310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Ketua

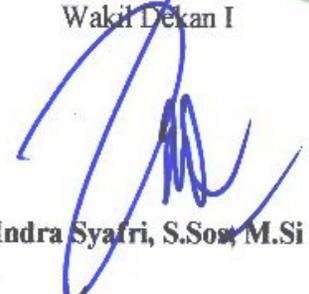
Sekretaris

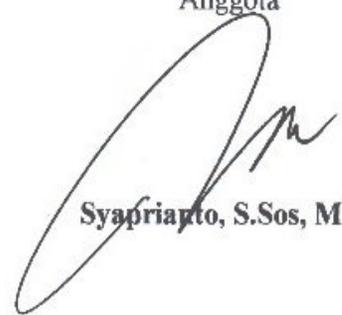

Andriyus, S.Sos, M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I

Anggota


Indra Syafri, S.Sos, M.Si


Syaprianto, S.Sos, M.IP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 2030 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ari Gusti Sutrisna
N P M : 177310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Peranan BPSPAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis.**

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahri Akmal Latif, M.Si.
NEK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

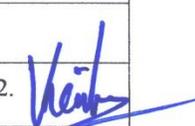
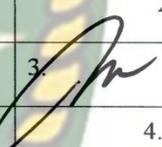
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0090 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Januari 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ari Gusti Sutrisna
NPM : 177310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan BPS PAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : ” ” ; Huruf : ” ”
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ari Gusti Sutrisna
NPM : 177310079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris


Andriyus, S.Sos, M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Indra Syafri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbal alamin tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Sholawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasul yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Sayyidina Muhammad Wa’alaa Alihii Sayyidina Muhammad”, assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Nabiyullah, assalamualaika ya Habibullah.

Adapun judul dari Skripsi ini yaitu “**Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan PAMSIMAS Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis**”. Skripsi ini penulis tulis dan ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Bapak Andriyus S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. **Bapak Andriyus S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan istimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada yang tercinta Ayah Legiran dan Ibu Nurhayati, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Adik-adik saya Doni, Zahra beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kakak Abang yang selalu memberi arahan dan motivasi Kak Eka, Bang Naen, Kak Mona, Mas Kiwid dan Abang Kakak yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Kawan satu perjuangan Sarah29, Nuri, Melita, Taci, Nia, Tiwi, Fiski, Ganang, Riki, Khairil, Irham, Firman dan seluruh kelas IP H angkatan 2017 dan orang-

orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Aamiin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 22 Februari 2022



Penulis

Ari Gusti Sutrisna



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
SURAT PERYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTARCT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	28
1. Tujuan Penelitian.....	28
2. Kegunaan Penelitian.....	28
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	31
1. Pemerintahan.....	31
2. Pemerintahan Daerah.....	33
3. Pemerintahan Desa.....	34
4. Peranan.....	39
5. Pengelolaan.....	42
6. Pamsimas.....	46

B. Penelitian Terdahulu	55
C. Kerangka Pikiran.....	56
D. Konsep Operasional	57
E. Operasional Variabel.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Informan dan Key Informan.....	62
D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan.....	62
E. Jenis Data dan Sumber Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data.....	63
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Jadwal waktu Kegiatan Penelitian	64
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Serai Wangi	66
1. Sejarah Desa Serai Wangi	66
2. Keadaan Geografis	67
3. Keadaan Penduduk.....	67
4. Keadaan Sosial	69
B. Suruktur Organisasi Pamsimas	72
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Serai Wangi.....	77
D. Fungsi Dan Tugas Organisasi	78
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	81
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	83
1. Norma – Norma	83
2. Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi.....	87

3. Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat.....	94
C. Faktor – Faktor Penghambat	101

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

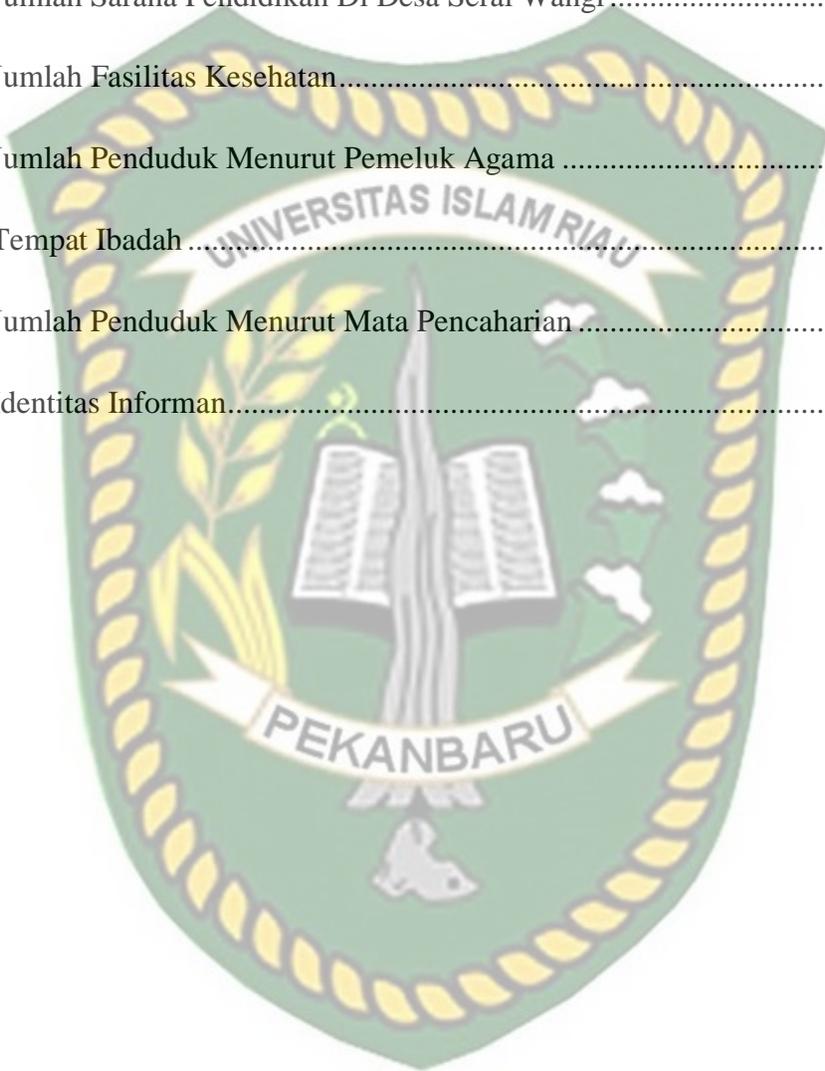


Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

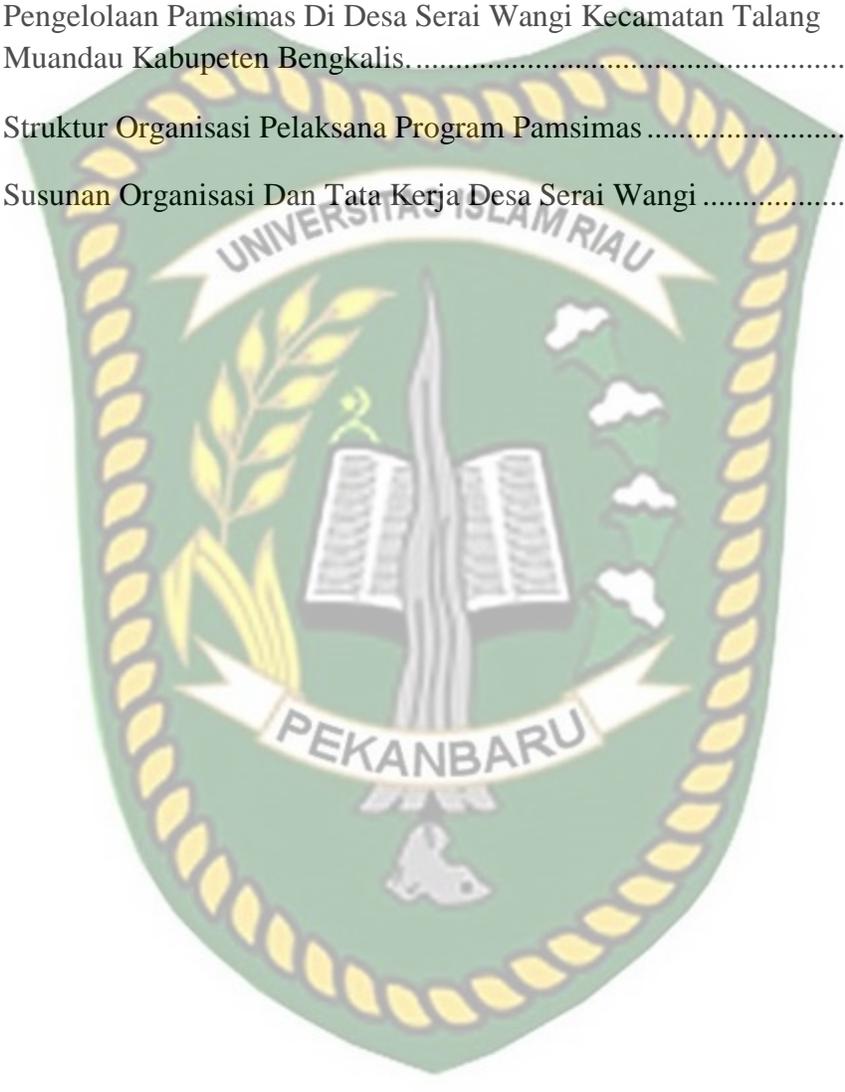
Tabel	Halaman
I.1 Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2010-2012 Menurut keputusan Menteri Pekerja Umum Nomor 15.1/KPTS/DC/.2012 khususnya di Wilayah Provinsi Riau.....	19
I.2 Jumlah Desa yang Terealisasi Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.....	22
I.3 Jumlah Desa Yang Telah Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.....	25
II.1 Penelitian Terdahulu.....	55
II.3 Operasional Variabel Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupeten Bengkalis.....	60
III.1 Jumlah Informan Dan Key Informan Penelitian Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupeten Bengkalis.....	62
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupeten Bengkalis.....	65
IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin	68
IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Suku Di Desa Serai Wangi	68

IV. 3 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin	69
IV.4 Jumlah Penduduk Mneurut Tingkat Pendidikan.....	70
IV.5 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Serai Wangi	70
IV.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	71
IV.7 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	71
IV.8 Tempat Ibadah	71
IV.9 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	72
V.I Identitas Informan.....	82



DAFTAR BAGAN

Gambar	Halaman
II.2 Bagan Kerangka Pikiran Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.....	57
IV.1 Struktur Organisasi Pelaksana Program Pamsimas.....	73
IV.2 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Desa Serai Wangi.....	78



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Ari Gusti Sutrisna

NPM : 177310079

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode Penelitian Ilmiah dan penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, Keseluruhan persyaratan Administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan ada terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Februari 2022

Yang Menyatakan



METERAL TEMPEL
377AAJX739962578

Ari Gusti Sutrisna

**PERANAN BPSPAMS DALAM PENGELOLAAN PAMSIMAS DI DESA
SERAI WANGI KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN
BENGKALIS**

ABSTRAK

ARI GUSTI SUTRISNA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pamsimas di Desa Serai Wangi dan faktor penghambatnya. Tipe penelitian berlokasi di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis menggunakan metode penelitian Kualitatif secara deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala BPSPAMS sebagai Key Informan dan informan yaitu Kepala Desa Serai Wangi, Fasilitator Masyarakat, Masyarakat Desa Serai Wangi. Penelitian ini menggunakan teori Peranan menurut Soerjono Soekanto dengan tiga indikator yaitu: Norma – norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas Kurang Berperan karena masih banyak terjadi hambatan – hambatan seperti struktur tanah yang tidak rata, respon pengelola dalam menjalankan pamsimas yang lambat, kurangnya pengawasan dalam keamanan Pamsimas yang menyebabkan terjadinya kehilangan mesin dan masih banyaknya masyarakat yang ingin menyalur air dari Pamsimas namun belum juga dapat tersalur dan tidak ada keberlanjutan Program Pamsimas.

Kata Kunci : Peranan, Pamsimas, Pengelolaan

**THE ROLE OF BPSPAMS IN PAMSIMAS MANAGEMENT IN SERAI
WANGI VILLAGE, TALANG MUANDAU DISTRICT, BENGKALIS
REGENCY**

ABSTRACT

ARI GUSTI SUTRISNA

This study was conducted to determine the problems that occur in Pamsimas in Serai Wangi Village and the inhibiting factors. This type of research is located in Serai Wangi Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency using descriptive qualitative research methods. While the data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. In this study, interviews were conducted with the Head of BPSPAMS as Key Informants and informants, namely the Head of Serai Wangi Village, Community Facilitator, Serai Wangi Village Community. This study uses role theory according to Soerjono Soekanto with three indicators, namely: norms, individuals in society as organizations, individuals who are important for the social structure of society. Based on the results of this study, it can be concluded that the role of BPSPAMS in the management of PAMSIMAS plays a less role because there are still many obstacles such as uneven soil structure, the response of managers in running PAMSIMAS is slow, lack of supervision in Pamsimas security which causes machine loss and there are still many people those who want to channel water from Pamsimas but have not been able to channel it and there is no continuity of the Pamsimas Program.

Keywords :Role, Pamsimas, Management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan suatu negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Untuk setiap daerah baik daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berkaitan dengan pemerintahan, dalam arti luas pemerintahan dapat disebut juga sebagai regering atau government, yakni segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang mempunyai otoriter atau kewenangan untuk menjalankan suatu kekuasaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit dapat di artikan sebagai aktivitas atau kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh fungsi eksekutif dan stafnya yaitu presiden, menteri-mentri sampai birokrasi paling bawah dengan tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan negara dapat menunjukkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara bertujuan untuk membuat negara semakin maju dan sukses sehingga menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan yaitu untuk menjaga atau melindungi sebuah sistem ketertiban sebagaimana masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan pemerintah. Di bentuknya suatu pemerintah bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi pemerintah harus melayani masyarakat, pemerintah juga harus menciptakan kondisi agar setiap orang dapat mengembangkan kemampuannya dan kreativitasnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan kepada suatu daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengingat dari potensi dan keberagaman daerah, maka dipandang perlu untuk mengedepankan asas demokrasi, peran serta masyarakat, fairness dan fair. Maka dari itu, penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan pemberdayaan kekuasaan yang luas, otentik, bertanggung jawab dan profesional.

Otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005). Didalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dari masa ke masa, mempunyai tiga azas yang digunakan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, yaitu azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada umumnya azas tugas pembantuan ditempatkan sebagai prinsip pelengkap dari azas desentralisasi dan

azas dekonsentrasi karena kewenangan yang diberikan tidak secara utuh, hanya sebatas pelaksanaan kekuasaan, dan prinsip yang ditetapkan pemerintah pusat sendiri.

Tugas pembantuan merupakan tugas yang diberikan pemerintah ke daerah dan / atau desa, dan dari daerah provinsi ke kabupaten atau kota sampai ke desa untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai standar biaya dan kinerja yang ditetapkan oleh pemberi tugas dan kewenangan yang diberi tugas tetap melekat pada lembaga pemberi tugas.

Tujuan dari tugas pembantuan ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik, serta untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan bersama yang dapat dilaksanakan. Tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan misi dan juga kemampuan menyelesaikan masalah, serta memajukan pembangunan daerah dan perdesaan.

Maka dari itu dalam hal ini merupakan bentuk pengalokasian suatu tugas, pemerintah dapat mengalokasikan tugas pembantuan kepada daerah provinsi, kabupaten / kota dan desa, juga dari provinsi ke daerah kabupaten / kota dan desa maupun dari kabupaten / kota ke desa.

Dalam suatu negara pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola masyarakat dalam suatu negara, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. pada dasarnya peran

memiliki arti kedudukan seseorang atau posisi. Peranan juga didefinisikan sebagai sekelompok perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Posisi didalam hal ini mengharapkan kedudukan sebagai posisi tertentu dalam kelompok masyarakat yang barangkali tinggi. Sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, serta hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai peran. Oleh dari itu, kedudukan dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role player).

Secara sosiologis, pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak – hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005). Apabila seseorang melaksanakan perannya dengan baik, maka tujuan yang diinginkan akan tercapai sesuai yang diinginkan. Secara umum, peranan adalah menentukan proses berkelanjutan. Apakah efeknya dinamis atau statis para pihak dan kewajiban di sebut juga subjektif. Peranan juga dapat didefinisikan sebagai tugas atau tugas kepada satu orang atau sekelompok orang.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam kesejahteraan rakyat pada aspek ekonomi, sosial dan pendidikan, termasuk juga kesehatan, seperti memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat berperilaku baik di lingkungannya. Adapun fungsi dari pemerintah dari pusat, daerah, dan pedesaan yaitu meliputi pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan pembangunan, pelayanan perlindungan dan pelayanan publik. Dengan pemerintah memberikan pelayanan ini dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

terkait dengan hal yang dimaksud, tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau selaku pemberi tugas kepada penerima tugas yaitu pemerintah daerah kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) untuk meningkatkan cakupan penduduk atas layanan air minum dan sanitasi yang memadai dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan manusia air merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tanpa air semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup, sama halnya dengan manusia tanpa adanya air tidak akan mampu untuk mempertahankan hidup dalam jangka waktu lama. Maka dari itu penyediaan air bersih adalah salah satu kebutuhan utama manusia untuk bertahan hidup dan merupakan penentu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan air terutama air minum harus sehat dan bebas polusi, tidak ada menimbulkan penyakit dan mengandung unsur racun.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air menyatakan bahwasannya negara memberikan jaminan kepada setiap orang agar mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan pokoknya minimal sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya agar bersih, sehat dan bermanfaat. Berdasarkan dari laporan WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja dari sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah, diperkirakan penduduk Indonesia tahun 2015 yaitu 218 juta jiwa, dimana ada 103 juta jiwa atau 47% tidak memiliki akses air bersih. Dan angka yang paling besar dapat terlihat pada penduduk perdesaan yaitu dapat

diperkirakan sekitar 62% atau 73 juta jiwa yang belum memiliki akses air minum dan air bersih.

Di perdesaan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan air bersih yang layak. Selain itu, masyarakat yang tinggal di pinggiran kota (peri-urban) berpenghasilan rendah, pemukiman dan lingkungan rawa, serta fasilitas sanitasi yang layak belum tersedia. Air bersih yang layak yaitu sesuai kualitas dan kuantitasnya. Kebutuhan air yang sepatutnya harus terpenuhi. Upaya penyediaan air minum dalam masyarakat harus sejalan dengan kesehatan dan sanitasi.

Pamsimas merupakan program kerja sama antara pemerintah Negara Indonesia dengan Bank Dunia dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota, Executing agency Pamsimas yaitu Departement Pekerja Umum dengan dukungan dari lembaga pelaksana Program lainnya seperti Departement Kesehatan, Departement Dalam Negeri dan Departement Pendidikan Nasional. Dengan dukungan dari Bank Dunia, rencana Pamsimas merupakan salah satu rencana dan tindakan nyata pemerintah (pusat dan daerah) untuk meningkatkan ketersediaan air minum, penyehatan lingkungan juga meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah air. Banyak nya penularan penyakit diare dan penyakit lainnya dari air dan lingkungan. Pamsimas juga merupakan aset yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dikelola BPSPAMS, 100% menjadi milik masyarakat. Dan merupakan salah satu program lintas kementerian : Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerja Umum, Kementerian Dalam Negeri, Dan Kementerian Keuangan.

Sejalan dalam hal ini Pemerintah melaksanakan program Pamsimas yaitu merupakan sala satu program nasional (pemerintah pusat dan daerah) untuk meningkatkan akses dari penduduk perdesaan dan peri-urban memiliki fasilitas air minum dan sanitasi yang memadai, dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pamsimas dilaksanakan pada tahun 2008 dan berhasil meningkat pada tahun 2012 orang miskin di daerah perdesaan dan pinggiran kota dapat menggunakan layanan sarana air minum dan sanitasi, serta meningkat nilai dan prilaku hidup bersih dan menyalurkan kesehatan di sekitar 6.800 desa / kelurahan yang tersebar dari 110 desa wilayah / kota.

Untuk meningkatkan akses bagi penduduk pinggiran kota dan perdesaan dalam fasilitas air minum dan sanitasi untuk mencapai tujuan rencana Pamsimas MDGs berlangsung hingga 2013 rencana Pamsimas II dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mendukung kedua rencana tersebut agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk layanan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan , yaitu air bersih bagi masyarakat dan sanitasi penuh berbasis masyarakat.

Setelah rencana program Pamsimas I tahun 2008-2013 dan Pamsimas II diimplementasikan mulai 2013 hingga 2015 telah dilaksanakan dan akan terus meningkatkan hak akses fasilitas air minum untuk penduduk pinggiran kota dan perdesaan dan sanitasi untuk mencapai tujuan akses terhadap air minum dan rencana Pamsimas melakukan penyehatan lingkungan pada tahun 2019 dan terus dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 khusus untuk desa-desa dan

wilayah tersebut. Program Pamsimas III pelaksanaannya untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk dengan layanan air minum dan sanitasi memadai, dan berkelanjutan, yaitu 100-100, yaitu 100% air minum dan 100% akses kebersihan dan sanitasi keseluruhan berbasis masyarakat.

Beberapa payung Hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan Program Pamsimas Kabupaten Bengkalis antara lain:

- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keberlanjutan Program PAMSIMAS Oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Kelompok Keswadayaan Masyarakat Dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus PAMSIMAS Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Bengkalis No 55 Tahun 2015 ini bermaksud untuk melanjutkan pembangunan, melalui peningkatan atau pengembangan sarana prasarana yang telah terbangun melalui berbagai program terutama Pamsimas sehingga menjadi unit sarana andalan dalam penyediaan air bersih/air minum di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkalis melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir angka penyakit yang disebabkan oleh air serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara umum.

Program ini juga bertujuan meningkatkan produktifitas masyarakat dalam penyediaan air bersih/air minum dan sanitasi dengan cara:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat, melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap sarana yang telah disediakan;
- b. Memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- c. Menciptakan masyarakat dan penyelenggara Pemerintahan yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia;
- d. Menciptakan masyarakat yang mampu secara mandiri, efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air minum.

Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pemerintah berupaya untuk Mewujudkan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk seluruh penduduk negara indonesia, Program Pamsimas memiliki tantangan dari berbagai mode pendekatan dan berkerja sama seacar proaktif dalam pemanfaatan sumber daya dana non pemrintahan, sumber daya manusia dan program khususnya di bidang peningkatan kapasitas dengan pihak-pihak di luar rencana Pamsimas.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pamsimas merupakan urusan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Mendukung Kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan fasilitas air minum dan sanitasi yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), rencana Pamsimas berperan untuk

memberikan dukungan finansial baik investasi fisik dan investasi berupa sarana dan prasarana manajemen non-material, dukungan teknis maupun pengembangan kapasitas.

Maka dari itu Program Pamsimas ini dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat (Laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan kelompok masyarakat. Berdasarkan kedua metode tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mempromosikan partisipasi dari masyarakat, proaktif dan aktif dalam memutuskan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengoperasikan serta melihat fasilitas yang dibangun dan aktivitas yang sedang berlangsung meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Untuk tercapainya Pelaksanaan Pamsimas dibutuhkan Organisasi pelaksana program, Organisasi pelaksana program dibentuk di setiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota) untuk mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Pelaku program Pamsimas di setiap tingkat memiliki tanggung jawab sesuai peran dan fungsinya.

Organisasi pengelola dan pelaksana di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan memberikan dukungan langsung bagi pelaksanaan kegiatan Pamsimas di desa dan masyarakat.

Untuk pelaksanaan di tingkat Desa dan Masyarakat Yaitu :

a. Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah Desa/Kelurahan merupakan salah satu pelaku kunci dalam program Pamsimas, meskipun masyarakat-lah yang mengelola dan melaksanakan kegiatan. Pemerintah desa/kelurahan berperan dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, mediasi dan koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan proyek di desa/kelurahan. Terutama sebelum terbentuknya unsure pelaksana kegiatan di masyarakat yang difasilitasi melalui program. Dalam hal ini pemerintah desa dapat melibatkan lembaga yang ada di desa yang terkait, seperti LPM, PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan lain sebagainya.

b. Fasilitator Masyarakat

Fasilitator bekerja untuk mendampingi masyarakat dengan basis pendampingan adalah kabupaten/kota. Fasilitator Masyarakat merupakan tenaga pendamping yang telah dilatih untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan, mendorong masyarakat untuk mau dan mampu berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

Tugas pokok fasilitator masyarakat adalah:

- memfasilitasi kegiatan penilaian, analisis dan penyusunan rencana kegiatan kelompok masyarakat seperti Program Jangka Menengah Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi/PJM ProAKSi dengan menggunakan metoda MPA (Methodology for Participatory Assessment).

- memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa, terutama BPSPAMS dan Kader AMPL, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program dalam peningkatan akses air minum, promosi kesehatan, dan sanitasi masyarakat. PJM ProAKSi tahun pertama akan dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).

Fokus terpenting dari pekerjaan fasilitator masyarakat adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya air, hidup bersih dan sehat serta membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan teknis, non teknis dan pengelolaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan memelihara sarana, serta menjamin keberlanjutan program Pamsimas.

c. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) adalah nama generic organisasi warga yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, sebagai organisasi yang sah menerima dan mengelola BLM Pamsimas. Kriteria anggota KKM ditentukan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan. Pemilihan anggota KKM melalui system tanpa calon, tanpa kampanye, tertulis, rahasia dan disepakati oleh seluruh warga. KKM adalah lembaga pengelola program, sedangkan lembaga pelaksana program adalah Satuan Pelaksana (Satlak) Program Pamsimas yang dibentuk oleh KKM. Pada Pamsimas 2008-2012 digunakan istilah LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) utk KKM. Pada Pamsimas 2013-2016 digunakan istilah KKM dan seluruh fungsi LKM melekat pada KKM ini. Di lokasi yang sudah mempunyai kelompok/organisasi

keswadayaan sejenis yang dibangun dengan prinsip dan pendekatan yang sama, dapat menggunakan organisasi yang telah ada.

d. BPSPAMS

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan biaya operasi dan pemeliharaan yang realistis agar menghasilkan efektivitas dan pelayanan yang berkelanjutan. Sehingga operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi harus terorganisasi dengan baik dan ditunjang dengan tertib administrasi untuk menciptakan pelayanan yang berkelanjutan. Pengelolaan tersebut dikelola oleh lembaga yang mewakili masyarakat dalam hal teknis yang dalam hal ini disebut dengan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). BPSPAMS dibentuk oleh KKM melalui musyawarah dan ditetapkan secara resmi oleh Kabupaten/Kota.

Kelembagaan BPSPAMS dibentuk sejak tahap perencanaan agar dapat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengoperasian dan pemeliharaan, sehingga BPSPAMS dapat memahami program lebih baik dan mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan terhadap desain program dengan mempertimbangkan upaya keberlanjutan yang akan diperlukan pada tahap pasca program. BPSPAMS merupakan unit otonom atau mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola organisasi secara intern namun tetap dibawah koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari BPSPAMS yaitu :

Tugas

- Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga termasuk halhal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat.
- Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BP SPAMS
- Memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada LKM dan Pemerintah Desa secara berkala (1 kali 6 bulan), dan mempublikasikannya.
- Mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.
- Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
- Mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana.
- Menginventarisasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan.
- Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi, antara lain :
 1. Menginventarisasi sarana dan prasarana sarana air minum dan sanitasi desa.
 2. Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi.

3. Mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi desa.

- Mengorganisasi kegiatan: pelestarian sumber air minum, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (di masyarakat dan sekolah), kegiatan kesehatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah) termasuk meningkatkan penggunaan jamban.

Fungsi

- Memberikan masukan terhadap pilihan opsi kegiatan yang direncanakan
- Memberikan masukan terhadap rencana operasional dan pemeliharaan untuk sarana terbangun, seperti rencana besaran iuran air dan proses pengelolaan keuangan
- Memonitor pelaksanaan kegiatan konstruksi dan kegiatan lain dalam RKM
- Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
- Mengorganisasi masyarakat untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jika dalam jumlah dan volume yang besar.
- Mengorganisasi kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber air.
- Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam RKM yang berkaitan dengan tahap Pascakonstruksi dan PJM Pro-Aksi
- Bersama masyarakat menetapkan tarif/iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

- Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pendanaan atau pengembangan sarana.
 - Mengorganisasi kegiatan peningkatan praktek hidup bersih-sehat di masyarakat dan sekolah.
 - Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain (kemitraan)
- e. Kader AMPL

Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Kader AMPL) adalah relawan masyarakat yang mempunyai kepedulian dan ketertarikan untuk pembangunan bidang air minum dan sanitasi di wilayah desa. Kader AMPL Desa diharapkan tidak merangkap sebagai pengurus BP-SPAMS Kader AMPL dipilih dari anggota masyarakat, yang terdiri dari minimal 1 orang, dan bila sudah terbentuk akan menjadi bagian dari Tim KPM Desa/ Kelurahan Jumlah kader AMPL yang mampu dibangun di tiap desa akan menentukan tingkat komitmen desa terhadap Pamsimas.

Kader AMPL berperan sebagai perwakilan masyarakat tingkat desa dalam menyuarakan kebutuhan prioritas pembangunan AMPL dalam forum musrenbang kecamatan dan kabupaten, memfasilitasi proses perencanaan bidang air minum dan sanitasi di masyarakat, serta dalam pemantauan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi di desa.

Didalam buku pedoman umum pengelolaan program Pamsimas edisi 2016 Ruang lingkup program pamsimas mencakup lima komponen program :

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa
2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi
3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
4. Hibah insentif: dan,
5. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program

Prinsip pendekatan pada program Pamsimas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Berbasis masyarakat; Merencanakan seluruh proses Pamsimas, seperti pemilihan kebutuhan air dan melaksanakan kegiatan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat.
2. Kemitraan; Melaksanakan kegiatan Pamsimas antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator
3. Partisipatif; yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatannya, masyarakat secara efektif berpartisipasi dalam semua kegiatan Pamsimas
4. Transparansi; Kegiatan Pamsimas dilakukan bersama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan masyarakat dapat mengakses semua kegiatan melalui data / informasi melalui media.
5. Tanggap kebutuhan; Menyelenggarakan kegiatan perencanaan Pamsimas sesuai kebutuhan masyarakat. Memperbaiki fasilitas air minum, sanitasi dan kesehatan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih dan membicarakan dalam proses Pamsimas.

6. Tepat mutu; Berarti konstruksi berkualitas tinggi. Semua fasilitas yang dibangun dengan bahan berkualitas tinggi harus memenuhi standar desain / standar teknis yang telah ditetapkan.
7. Kestinambungan/berkelanjutan sarana; Sarana yang dibangun dapat senantiasa menyediakan air bersih dengan kualitas yang bermutu (dari sisi pengguna dan pemerintah) dan memenuhi kebutuhan air dalam negeri, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan sarana agar tetap berfungsi.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 15.1/KPTS/DC/2012 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2010-2012 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwasannya Pamsimas merupakan salah satu program pemberdayaan yang termasuk dalam program penguatan PNPM Mandiri dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Bahwasannya pelaksanaan Pamsimas melibatkan dan bekerja sama dengan kementerian kesehatan dan kementrianndalam negeri sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam pedoman Pamsimas.
- c. Bahwa nama desa sasaran Pamsimas yang ditetapkan melalui surat keputusan ini diperoleh dari usulan Bupati/Walikota atau ketua DPMU Program

Pamsimas Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi oleh Satker PKP Air Minum Provinsi dan CPMU Pamsimas.

Dalam pengambilan keputusan Penempatan Sasaran untuk Desa Pamsimas, kita bisa melihat tabel awal berikut ini :

Tabel 1.1 : Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2010-2012 Menurut keputusan Menteri Pekerja Umum Nomor 15.1/KPTS/DC/.2012 khususnya di Wilayah Provinsi Riau

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	
Riau	Bengkalis	Bantan	Bantan Air	
			Muntai	
			Teluk Pambang	
			Kembung Luar	
			Jangkang	
			Bantan Tuan	
			Bantan Tengah	
			Teluk Lancar	
		Bukit Batu	Api-Api	
			Temiang	
			Tenggayun	
			Bukit Batu	
			Buruk Bakul	
			Suka Jadi	
			Parit 1 Api-Api	
			Sepahat	
			Tanjung Leban	
			Sungai Selari	
			Bukit Kerikil	
			Siak Kecil	Langkat
				Sadar Jaya
				Tanjung Belit
	Lubuk Gaung			
	Sungai Linau			

1	2	3	4
			Muara Dua
			Sungai Siput®
			Sepotong®
			Tanjung Damai®
			Sumber Jaya
		Bengkalis	Ketan Putih
			Pematang Duku
			Sekodi
			Pangkalan Batang
			Meskom
			Penampi
			Temeran
			Penebal
			Teluk Latak
			Pedekik
			Sebauk
		Rupat	Tanjung Kapal
			Hutan Panjang
			Terkul®
			Pergam®
			Sukarjo Mesim®
			Teluk Lecah®
			Sungai Cingam®
			Batu Panjang
			Parit Kebumen
			Darul Aman
			Makeruh
			Pangkalan Nyirih
		Rupat Utara	Titi Akar
			Kadur
			Tanjung Medang
			Teluk Rhu
			Tanjung Punak
		Mandau	Bumbung
			Kesumbu Ampai
			Sebangar
			Harapan Baru
			Talang Mandi

1	2	3	4
			Petani
			Pematang Pudu
			Balai Makam
			Babussalam
			Air Jamban
			Balik Alam
		Talang Muandau	Serai Wangi
			Tasik Serai
			Tasik Serai Timur
			Beringin
			Kuala Penaso
		Pinggir	Balai Raja
			Titian Antui
			Balai Pungut
			Muara Basung
Jumlah		9	77

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Salah satu dalam pencapaian program ini adalah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Talang Muandau ini terdiri dari sembilan (9) Desa yaitu Serai wangi, Beringin, Koto Pait, Kuala Penaso, Melibur, Tasik Serai, Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur dan Tebing Serai. Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan Daerah dengan Pertumbuhan penduduk tertinggi dan tercepat maka mermintaan dan kebutuhan akan air masih terus meningkat, salah satunya di Kecamatan Talang Muandau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkalis telah menyediakan rencana sarana dan prasarana seperti Pamsimas.

Tabel 1.2 : Jumlah Desa yang Terealisasi Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Tahun	Nama Desa	Total RKM	Keterangan
2010	Serai Wangi	Rp 275.000.000	PAMSIMAS REGULER
	Tasik Serai	Rp 473.630.358	PAMSIMAS REGULER
	Tasik Serai Timur	Rp 280.653.355	PAMSIMAS REGULER
2011	Beringin	Rp 275.000.000	PAMSIMAS REGULER
	Kuala Penaso	Rp 275.000.000	PAMSIMAS REGULER
2012	Serai Wangi	Rp 250.000.000	PAMSIMAS HDI
	Tasik Serai	Rp 250.000.000	PAMSIMAS HDI

Sumber : Dinas Tata Ruang, Tata Kota dan Pemukiman 2022

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yaitu rencana kerja yang disiapkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Fasilitator Keberlanjutan (FK) kepada kelompok kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten / Kota.

Dapat diketahui dari tabel pada tahun 2010 terlihat bahwasannya ada tiga Desa yang Terealisasi mendapat Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Termasuk desa Serai Wangi, Tasik Serai dan Tasik Serai Timur dengan itu mendapatkan Program Pamsimas Reguler.

Pamsimas Reguler merupakan salah satu target Kabupaten / Kota yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Komposisi dananya menyumbang 80% dari dana APBN. Dan minimal sumbangan masyarakat sebesar 20% dari total biaya RKM, dari uang tunai (in cash) minimal 4% dan dalam bentuk barang (in kind) minimal 16%, merupakan penyediaan dana untuk kegiatan msyarakat, rencana dan kegiatan masyarakat yang ditentukan dalam RKM.

Pada tahun 2011 diatas Desa yang Terealisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Beringin dan Kuala Penaso. Kedua Desa tersebut mendapatkan keterangan yaitu Pamsimas Reguler, total nilai RKM dari masing-masing Desa sama yaitu senilai Rp 275.000.000.

Pamsimas Hibah Insentif Desa / Kelurahan (HID) Bertujuan untuk memberikan penghargaan atau reward kepada sejumlah Desa / Kelurahan yang telah menerima rencana Pamsimas, serta untuk meningkatkan dan memperluas cakupan layanan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa.

Pada tahun 2012 terdapat dua Desa yang terealisasi mendapatkan Program Pamsimas yaitu Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai. Pada tahun 2010 Desa Serai Wangi dan Desa Tasik serai sudah mendapatkan Program Pamsimas tetapi pada Tahun 2012 Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai mendapatkan lagi Program Pamsimas Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan pemantauan yang dicantumkan oleh penulis status BPSPAMS menunjukkan bahwa Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai secara aktif melaksanakan rencana Pamsimas, sehingga Desa serai Wangi dan Desa Tasik Serai menerima Hibah Insentif Desa / Kelurahan.

Anggaran pembangunan tahunan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan Visi & Misi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang ingin berkembang secara adil dan mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh lapisan

Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membuktikan hal ini kepada setiap Kabupaten yang ada, dan tanpa terkecuali Daerah Kecamatan Talang Muandau.

Hal ini akan berhasil meningkatkan jumlah masyarakat miskin perdesaan dan pinggira Kota yang memiliki akses terhadap layanan Air dan Sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat yang merupakan syarat strategis bagi Pemerintah dan Pemerintah untuk menyediakan juga meningkatkan kualitas pelayanan Air Minum dan Sanitasi.

Tujuan tersedianya sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat secara berkelanjutan adalah untuk menjaga dan meningkatkan kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan sarana Air Minum dan Sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk perdesaan, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pamsimas. Sehingga sarana dan prasarana yang dilaksanakan dapat digunakan secara berkelanjutan. Monitoring ini dilakukan untuk mengukur kemajuan disemua aspek yang mempengaruhi keberlanjutan dan perubahan perilaku masyarakat. Berikut adalah aspek – aspek monitoring berkelanjutan: Dalam buku petunjuk teknis penguatan berkelanjutan Program Pamsimas edisi 2013.

1. Efektivitas keberlanjutan sistem yang meliputi kualitas sistem, keberfungsian dan keungan.
2. Efektivitas penggunaan, terutama untuk mengetahui pertambahan akses AMPL.
3. Ketanggapan program terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Kesetaraan dalam pengelolaan.
5. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan.
6. Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Tabel 1.3: Jumlah Desa Yang Telah Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Tahun	Nama Desa	Pembangunan Sarana Air Bersih							Status BPSAM S
		Sumur bor (unit)	Sumur gali penangkap mata air (unit)	Menara air+rumah mesin (unit)	Hidran umum (unit)	Pipa (meter)	Saringan pasir lambat (unit)	Kran umum (unit)	
2010	Serai Wangi	1	1	-	-	3,096	1	-	Aktif
	Tasik Serai	-	1	1	20	3,220	-	-	Aktif
	Tasik Serai Timur	6	-	6	-	-	-	12	Kurang Aktif
2011	Kuala Penaso	1	-	1	-	210	-	2	Tidak Aktif
	Beringin	1	-	1	-	156	-	2	Kurang Aktif

Sumber : Dinas Tata Ruang, Tata Kota dan Pemukiman 2022

Dapat dilihat dari pada tahun 2010 Desa Serai Wangi, Desa Tasik Serai, Desa Tasik Serai Timur sudah terlaksana monitoring. Dapat dilihat pada Desa Tasik Serai Timur yang kurang aktif berbeda dengan Desa Serai Wangi dan Desa Tasik Serai yang masih aktif.

Dari pembangunan sarana air bersih pada Desa Serai Wangi memperoleh 1 unit sumur bor, 1 unit sumur gali penangkap mata air, dan pipa 3.096 meter kemudian Desa Tasik Serai memperoleh 1 unit sumur gali penangkap mata air, 1 unit menara air + rumah mesin, hidran umum 20 unit dan pipa 3.220 meter selanjutnya Desa Tasik Serai Timur memperoleh 6 unit sumur bor, 6 unit menara air + rumah mesin dan dua belas unit kran umum.

Dari data yang diperoleh pada tahun 2011 ada dua Desa yang telah dilakukan monitoring. Dari kedua Desa tersebut satu Desa kurang aktif yaitu Desa Beringin dan satu Desa Program Pamsimasnya tidak aktif yaitu Desa Kuala Penaso.

Dengan pembangunan sarana untuk Desa Kuala Penaso 1 unit sumur bor, satu unit menara air + rumah mesin, 210 meter pipa dan 2 unit kran umum. Untuk pembangunan sarana Desa Beringin yaitu 1 unit sumur bor, 1 unit menara air + rumah mesin, 156 meter pipa dan 2 unit kran umum.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membagi pada satu topik penelitian yaitu pada Desa Serai Wangi. Desa Serai Wangi adalah salah satu Di Kecamatan Talang Muandau. Seperti dapat dilihat pada tabel diatas, pendataan Desa Serai Wangi sudah mendapatkan sarana dan prasarana Pamsimas pada tahun 2010 setelah peneliti melakukan observasi terdapat 73 rumah masyarakat yang tersalur ke Pamsimas dan

berdasarkan dari hasil identifikasi banyak ditemukan bahwa selama ini pengelolaan Pamsimas masih banyak mengalami permasalahan seperti manajemen perawatan pada Pamsimas Desa Serai Wangi masih banyak menimbulkan permasalahan seperti pada beberapa rumah warga juga terdapat beberapa permasalahan dalam pengaliran air yang tidak proporsional air yang masuk kerumah terlalu lambat. Pada tahun 2017 Pamsimas Desa Serai Wangi juga mengalami kehilangan satu unit mesin (dong feng) dan satu mesin air sehingga membuat Pamsimas tidak beroperasi dengan baik hingga saat ini.

Selanjutnya dari judul yang telah di tulis oleh penulis yaitu Peranan BPSPAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis penulis mengambil judul tersebut dikarenakan ada beberapa fenomena – fenomena yang timbul yaitu :

1. Terindikasi masih banyaknya masyarakat penerima Program Pamsimas yang komplain karena seringnya air tidak berjalan dengan normal dan mesin mati.
2. Terindikasi pada beberapa rumah warga juga terdapat beberapa permasalahan dalam pengaliran air yang tidak proporsional air yang masuk kerumah terlalu lambat dan Pamsimas Desa Serai Wangi juga mengalami kehilangan satu unit mesin (Dong Feng) dan satu mesin air sehingga membuat Pamsimas tidak beroperasi dengan baik hingga saat ini.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Peranan BPSPAMS dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan BPSPAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas yang ada di Desa Serai Wangi?
2. Apa hambatan – hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya Program Pamsimas yang telah ada?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

1. Untuk mengetahui Peran BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas yang ada di Desa Serai Wangi.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pengelolaan Pamsimas yang telah ada sehingga tidak berjalannya Program Pamsimas di Desa Serai Wangi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi sebagai ilmu pengembangan akademik
- Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pelaksanaan rencana Program Pamsimas
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam dunia akademis, khususnya mengetahui Peran Pemerintah dalam pengelolaan Pamsimas, faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Pamsimas, dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melaksanakan keberlanjutan Pamsimas.

b. Manfaat Praktis

Peneliti secara praktis memberikan manfaat antara lain :

a. Untuk Peneliti

Sebagai penambah pengetahuan bagi penulis berkenaan dengan Peran BPSPAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

b. Untuk Masyarakat

Peneliti berharap ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam mendapatkan akses air bersih. Memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam Program Pamsimas dan Memiliki rasa memiliki

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Menurut (Inu Kencana Syafie, 2003; 133-134) Secara etimologi kata Pemerintahan berasal dari kata “Perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut.

1. Mendapat awalan “P” menjadi kata “Perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “Pemerintahan” berarti prihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Lalu menurut (Inu Kencana Syafie, 2007; 4) Secara Etimologi Pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut dibawah ini :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Kemudian Indroharto (dalam Ridwan HR, 2006;83) mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara itu diantaranya :

- a. Instansi – instansi resmi Pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai kepala Eksekutif;
- b. Instansi – instansi dalam lingkungan Negara diluar lingkungan kekuasaan Eksekutif yang berdasarkan peraturan Perundang – undangan melaksanakan urusan Pemerintahan;
- c. Badan – badan hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas – tugas Pemerintahan;
- d. Instansi – instansi yang merupakan kerja sama antara pihak Pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas – tugas Pemerintahan;
- e. Lembaga – lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan Perundang – undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan.

Menurut (Harmaily Ibrahim, 1981; 171) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang di lakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas – tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Menurut (Wirman Syafri, 2012; 134) Dalam arti luas pemerintah dapat diartikan segala usaha yang dilakukan oleh institusi negara untuk mencapai tujuan kenegaraan.

Dari beberapa teori di atas yang mengartikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang – orang yang mempunyai kekuasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan adalah suatu lembaga yang mewakili rakyat untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya, mengatur kehidupan bangsa dan mempertahankan negaranya.

2. **Pemerintah Daerah**

Menurut (Yusnani, 2017; 29) Pemerintah Daerah adalah subbahasan yang terus berkembang dalam pengaturannya, baik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini sudah berulang kali mengalami pergantian landasan yuridisnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pasal 18 Ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. “Pasal 18 Ayat (6) menyatakan, Pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintahan Desa

Menurut (Hanif Nurcolas, 2015; 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Lalu dalam buku pedoman standar layanan informasi publik untuk Pemerintahan Desa sesuai Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP), maka Pemerintah Desa adalah badan publik yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yakni:

- a. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik, secara aktif (tanpa adanya permohonan) maupun secara pasif (dengan adanya permohonan);
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- c. Menunjukkan dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
- d. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, dengan memanfaatkan media elektronik dan non elektronik;
- g. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
- h. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh permohonan informasi publik yang mengajukan keberatan;

- i. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan PERKI No. 1 Tahun 2010, serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;

Didalam (Undang – undang RI no. 6 tahun 2014) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa berkedudukan diwilayah kabupaten atau kota. Desa terdiri dari desa dan desa adat.

1. Penataan desa

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan:

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing desain.

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Pembentukan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Penggabungan;
 - d. Perubahan status; dan
 - e. Penetapan desa
2. Kewenangan desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pe,binaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan b diatur dan diurus oleh desa.

3. Penyelenggaraan pemerintahan desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembanguana desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Musyawarah desa

Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hal yang bersifat strategis pada ayat 1 meliputi:

- a. Penataan desa;
 - b. Perencanaan desa;
 - c. Kerja sama desa;
 - d. Rencana investasi yang masuk kedesa;
 - e. Pembentukan BUM desa;
 - f. Penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
5. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa.

Dari pengertian – pengertian Pemerintah Desa tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Pemerintahan Desa adalah urusan Desa yang dipimpin oleh Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

4. Peranan

Menurut (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005; 43) Secara sosiologi, pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak – hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif.

Lalu menurut Soejono Soekanto (2012; 212) memberikan pengertian tentang peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Teori peran (Role Theori) secara prinsip memberikan definisi terhadap peranan dari berbagai sudut pandang dimana peranan itu terjadi tergantung pada disiplin ilmu dan orientasi yang akan dicapai pemberi teori.

Kemudian Biddle dan Thomas dalam (Sarlito Wirawan Sarwono 1998; 209) membagi istilah dalam teori peran menjadi beberapa golongan. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social, hal ini dapat dibagi menjadi: a) actor/pelaku yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. b) Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan actor.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. Biddle dan Thomas (dalam Sarwon, 2005; 29) memberikan lima istilah dalam perilaku yang berkaitan dengan peran yaitu: a) Harapan (*Expectation*), dimana terdapat harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya di tunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. b) Norma, hanya berupa salah satu harapan. c) Wujud perilaku Peran dibuktikan dalam perilaku oleh actor. d) Penilaian dan sanksi penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri.

(Soerjono Soekanto, 2002 ; 243) mengemukakan peranan mencakup, tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Merton (dalam Raho, 2007; 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Menurut (Ndraha, 1997; 253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih setelah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Judistira (dalam Giroth, 2004;25-26) bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain

psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

(Soekanto, 2002; 243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Jadi dari beberapa pendapat ahli mengenai konsep peran, maka dapat diartikan bahwasanya peranan yaitu tindakan suatu kelompok atau organisasi yang diharapkan atau lingkungan yang membutuhkan peranan itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

5. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola; yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti dari pengelolaan itu sendiri adalah proses, cara pembuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Wayong (2009 : 54) pengertian pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Lalu menurut (Nugroho, 2003; 119) Mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Kemudian (Terry, 2009; 9) Mengemukakan bahwa: pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda – bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Balderton (dalam Adisasmita,2011;22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia yang memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

b. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi dari pengelolaan (manajemen) tersebut, dapat disimpulkan dalam melakukan pengelolaan memiliki tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi – fungsi pengelolaan (manajemen) ini bersifat universal.

Menurut Mulya (2004,40-41) manajemen atau pengelolaan terdapat beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan – tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan trekoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi seseorang penelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu langkah untuk memberikan penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun secara fungsional agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.

4. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut delegasi diselesaikan seperti

yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dan pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

c. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan dengan maksimal, dan dapat mengurangi resiko pemborosan dari banyak aspek dalam organisasi tersebut. Setiap organisasi pasti memerlukan system pengelolaan yang baik. Karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik maka semua usaha yang dilakukan tidak akan mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Ada beberapa tujuan dari pengelolaan yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan dari organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan –tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan – tujuan, sasaran dan kegiatan – kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang memiliki kepentingan di dalam organisasi.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyaknya cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisiensi dan efektivitas.

6. Program Pamsimas

Program Pamsimas adalah program bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa dan komunitas. (Pamsimas, 2016)

berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demandresponsiveapproach) Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan,

mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima komponen program:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa;
- b. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
- c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
- d. Hibah Insentif; dan,
- e. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

Percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019.

- a. Manfaat pedoman

Program Pamsimas adalah program yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai unsur dan pihak dengan para pelaku yang berbeda baik dari kedudukan dan pengetahuan sehingga memerlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya.

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang diharapkan tercapai dengan adanya pedoman ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ada kesamaan pandang antara pelaku Pamsimas di berbagai tataran mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dicapai oleh program.
- 2) Ada tuntunan bagi para pelaku Pamsimas dalam melaksanakan kegiatan Pamsimas di desa.
- 3) Ada standar baku mutu untuk pencapaian hasil kerja Pamsimas di desa sehingga memudahkan untuk dilakukan evaluasi secara nasional untuk menentukan apakah program berhasil atau tidak.
- 4) Memudahkan replikasi atau adopsi terkait implementasi program oleh para pelaku program maupun pihak di luar program.

b. Tujuan Pamsimas

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan periurban.

Tujuan Program Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun indikator kinerja kunci (key performance indicator/KPI) Program Pamsimas, yaitu:

- 1) Terdapat tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman² dan berkelanjutan;
- 2) Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 3) Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknya menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
- 4) Minimal 70% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- 5) Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
- 6) Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

c. Sasaran Pamsimas

Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang

bersangkutan. Target desa sasaran Program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000 desa peserta Pamsimas.

Secara umum, kriteria desa sasaran baru Pamsimas meliputi:

- 1) Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas;
- 2) Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%; yaitu di bawah 68.87%;
- 3) Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%; yaitu di bawah 62.41%;
- 4) Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
- 5) Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien³;
- 6) Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDesa;
- 7) Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
 - a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL);



b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan 16 % dalam bentuk natura (in-kind);

7. Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).

8. Strategi, pendekatan dan prinsip.

9. Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam Program Pamsimas adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggap Kebutuhan - Program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan BLM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat;
- 2) Partisipatif - seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Program Pamsimas;
- 3) Kesetaraan Gender - Program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi;
- 4) Keberpihakan pada Masyarakat Miskin - Program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman;

- 5) Akses bagi Semua Masyarakat - Program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 6) Perlindungan pada Anak - Program Pamsimas memastikan bahwa pelayanan yang air dan sanitasi yang dibangun melalui program mudah untuk dimanfaatkan dan ramah pada anak;
- 7) Keberlanjutan - sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku Program Pamsimas sejak awal pelaksanaan;
- 8) Transparansi dan Akuntabilitas - pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program Pamsimas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;
- 9) Berbasis Nilai - Program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong.

10. Hibah Insentif

Hibah insentif untuk desa dan kabupaten dilaksanakan sebagai dukungan pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan serta perbaikan kinerja SPAM perdesaan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa. Hibah akan diberikan kepada desa dan kabupaten yang telah melaksanakan

Pamsimas dengan kinerja yang baik atau masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi pelayanan SPAM saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia. Selain itu, Pamsimas bekerjasama dengan Program Hibah Air Minum yang dikelola oleh Direktorat Jendral Cipta Karya memberikan pendampingan bagi kabupaten dan desa yang sesuai dengan kriteria untuk berpartisipasi dalam Program Hibah Air Minum Perdesaan dalam rangka percepatan pencapaian target akses air minum dan sanitasi.

11. Penguatan Kelembagaan

1) Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat

Aspek penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat meliputi:

- Penguatan fungsi Panitia Kemitraan pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan sebagai lembaga/organisasi yang bertanggung jawab membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan;
- Peningkatan kinerja BPSPAMS sebagai pengelola SPAM terbangun dan kegiatan kesehatan di tingkat desa;

2) Pembentukan dan Penguatan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan

Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah wadah/forum bagi kelompok pengelola SPAM di perdesaan (melalui Program Pamsimas maupun non Pamsimas) yang berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten dan mewakili masyarakat untuk kepentingan pembangunan air minum dan sanitasi. Salah satu peran asosiasi adalah sebagai mitra pemerintah dan pihak peduli lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten, sehingga pembentukan dan penguatan asosiasi dapat difasilitasi oleh Program Pamsimas.

3) Peningkatan Kinerja BPSPAMS

Peningkatan kapasitas Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BSPAMS) berorientasi pada kemandirian lembaga tersebut, sehingga kapasitas BSPAMS merupakan faktor kunci keberlanjutan pelayanan SPAM terbangun di tingkat desa. Pembinaan BPSPAMS merupakan salah satu agenda Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan yang berkelanjutan.

12. Pengelolaan Data Air Minum dan Sanitasi

Program Pamsimas telah mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) yang digunakan sebagai alat untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian program, serta sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan. SIM Pamsimas meliputi informasi kegiatan, capaian dan kinerja pelaksanaan, maupun kinerja kelembagaan pasca

program SPAMS perdesaan. Pada tahap pasca program, sistem pengelolaan data dan informasi SPAMS perdesaan diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Muttofi'ah	Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)	2020	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris	Menggunakan Metode Kualitatif
2	Nur Ishobatul Ilma	Manajemen Keuangan Pada Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Kalirandugede Kecamatan Cepirang Kabupaten Kendal	2019	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian	Persamaan menggunakan metode Kuantitatif
3	Mega Salpiana	Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan	2015	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi desa	Persamaan Penelitian dilaksanakan di Kabupaten

		Pinggir Kabupaten Bengkalis		penelitian dan Metode Penelitian menggunakan metode Kuantitatif	Bengkalis dan penarikan Sampel menggunakan Purposif Sampling
4	Onni Trijunianto	Analisis Faktor Keberlanjutan Sarana Air Minum Program PAMSIMAS Di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	2016	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan menggunakan metode Kuantitatif	Persamaan Menggunakan Penarikan Sampel Purposif Sampling
5	Dewi Lestari	Kontribusi Program PAMSIMAS Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Tingkat Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	2016	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi	Persamaan menggunakan metode Kuantitatif

Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2022

C. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Gambar II.2: Bagan Kerangka Pikiran Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupeten Bengkalis.



Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2022

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan juga dapat diukur sesuai realita.

- a. Pemerintahan, adalah proses atau cara, pembuatan memerintah dan segala urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.
- b. Pemerintahan Daerah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Peranan, adalah sikap atau perilaku yang diinginkan sekelompok orang atau banyak orang terhadap orang yang memiliki kedudukan atau status tertentu.
- e. Pengelolaan, adalah suatu proses menangani atau mengurus sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
- f. Pamsimas, adalah Program yang dilaksanakan pemerintah negara indonesia yang di dukung Bank dunia, dan Program ini dilaksanakan di Desa – Desa dan Pinggiran Kota.
- g. Norma – norma adalah kebiasaan umum atau aturan-aturan yang menjadi sebuah pedoman perilaku yang sudah ada didalam suatu kelompok masyarakat.
- h. individu dalam masyarakat sebagai organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu dan saling bekerja sama.

- i. Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat adalah didalam struktur sosial individu merupakan sebuah unit terkecil yaitu ketika individu tersebut membentuk sebuah kelompok-kelompok sosial yang berdasarkan dari ciri dan karakteristik maka dari itu setiap kelompok berkontribusi dalam sistem-sistem sosial masyarakat yang lebih luas.

E. Operasional Variabel

Operasi subjek penelitian ini merupakan objek suatu penelitian yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah dari variabel dibawah ini :



Tabel II.3: Operasional Variabel Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
(Soerjono Soekanto, 2002 ; 243) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.	Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma-norma 2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan yang mengatur Program Pamsimas 2. Adanya SOP Pengelolaan Pamsimas 1. Kemampuan BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas 2. Transparansi Pengelolaan Pamsimas 1. Respon BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas 2. Respon Masyarakat dalam pengelolaan Pamsimas

Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiono, 2015; 15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Serta Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Metode penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan BPSPAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi. Lokasi penelitian dalam Skripsi ini dilaksanakan di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Dasar pertimbangan dipilihnya Desa Serai Wangi sebagai tempat lokasi penelitian adalah (a) Terindikasi masih banyaknya masyarakat penerima Program Pamsimas yang komplain karena seringnya air tidak berjalan dengan normal dan mesin mati. (b) Terindikasi pada beberapa rumah warga juga terdapat beberapa permasalahan dalam pengaliran air yang tidak proporsional air yang masuk kerumah terlalu lambat dan Pamsimas Desa Serai Wangi

juga mengalami kehilangan satu unit mesin (Dong Feng) dan mesin air sehingga membuat Pamsimas tidak beroperasi dengan baik hingga saat ini.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang mejadi bagian dari informan penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Pengelola BPSPAMS, Fasilitator Masyarakat dan Masyarakat Desa Serai Wangi.

Tabel III.1 : Jumlah Informan Dan Key Informan Penelitian Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupeten Bengkalis.

No	Informan Penelitian	Informan
1	Kepala Desa	Informan
2	Ketua BPSPAMS	Key Informan
3	Fasilitator Masyarakat	Informan
4	Masyarakat Pengguna Pamsimas	Informan

Sumber : data olahan, 2022

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian BPSPAMS Desa dalam pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Untuk Kepala Desa, Ketua BPSPAMS, Fasilitator Masyarakat, Masyarakat Desa Serai Wangi yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling menurut (Sugiyono,2011; 68) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menggunakan teknik ini karena teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu, alasan menggunakan metode tersebut karena langsung kepada orang yang ahli atau lebih memahami permasalahannya.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dilapangan melalui kuisisioner, wawancara dan observasi. Data primer ini berkaitan dengan fenomena – fenomena yang ada di Desa Serai Wangi tentang Peranan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapat oleh peneliti dari lokasi penelitian yaitu di Desa Serai Wangi informasi atau keterangan didapat dari pemerintah Desa/Kelurahan, Fasilitator Masyarakat, Badan Pengelola Pamsimas, dan Masyarakat Desa Serai Wangi. Dan data sekunder berupa bukti catatan/laporan yang tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan dan juga yang tidak dipublikasikan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu aktivitas sempit, yakni memperhatikan sesuatu hanya dengan mata telanjang (Kun Maryati, 2007; 133). Yaitu mengamati langsung objek yang diteliti atau langsung turun kelapangan yaitu di

Desa Serai Wangi dengan alasan untuk mendapatkan data dan mengetahui Peranan yang dilakukan Pemerintah Desa.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan (Gulo, 2005; 119). Penelitian akan melakukan wawancara secara terstruktur dan nonstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada informan di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk lebih memperjelas hasil dari kusioner yang telah diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan pengumpulan data - data atau arsip dan mengambil gambar – gambar dari dokumen yang berada dilapangan tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Kualitatif secara deskriptif, yaitu dengan metode ini memberikan gambaran sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori – teori berbentuk uraian dan selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Mingguan Tahun 2021-2022															
		Januari- Februari				Maret- April				Mei- oktober				November- Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Perbaiki Hasil Seminar																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengelolaan Data																
6	Bimbingan Skripsi																
7	Ujian Skripsi																
8	Revisi dan pengesahan skripsi																
9	Penyerahan Skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Serai Wangi

1. Sejarah Desa Serai Wangi

Desa Serai Wangi berasal dari Desa persiapan Pemukiman Transmigrasi UPT 1 HTI Tasik Serai, yang terletak di tengah – tengah Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau sekarang, dulunya kecamatan Pinggir, dengan luas wilayah dalam Program Transimgrasi 625 Hektar dengan pembagian lahan pemukiman 75 Ha, lahan pungut 300 Ha, lahan usaha pangan 225 Ha, fasilitas umum 8 Ha, tanah kas Desa 14 Ha dan tanah perkebunan 3 Ha. Namun pada saat ini yang terwujud hanya 100 Ha kekurangan 525 Ha tidak terealisasi.

Desa serai wangi berbatasan dengan sebelah utara berbatas dengan desa tasik serai timur, sebelah timur berbatasan dengan desa tasik serai timur, sebelah selatan berbatasan dengan desa tasik serai timur dan sebelah barat berbatasan dengan desa tasik serai timur.

Pada tanggal 05 April 1994 terbentuklah Pjs Kepala desa yang ditunjuk langsung oleh KUPT yang pada saat itu dijabat oleh Bapak A. Basuki selama 2 tahun yakni dari tanggal 05 April 1994 s/d 05 April 1996, masih disebut Desa Trans HTI Tasik Serai dan belum juga diakui sebagai Desa di Kabupaten Bengkalis, namun seluruh Pemerintah Desa di tatar selama 1 bulan di balai latihan Trans Pekanbaru. Dalam

masa jabatan bapak A. Basuki selaku Pjs, Kepala Desa pada tanggal 09 Juli 1995 barulah datang utusan dari kantor camat Mandau untuk memilih nama Desa ini dan dari berpuluh – puluh nama Desa yang diajukan salah seorang warga mengajukan sebuah nama Serai Wangi dengan dalih jangan lupa kacang pada kulitnya karena Desa asal adalah Tasik Serai.

2. Keadaan Geografis

Desa Serai Wangi memiliki luas wilayah 100 Ha dengan dikelilingi perkebunan sawit masyarakat. Jarak Pemerintahan Desa Serai Wangi dengan Pemerintahan Kecamatan talang Muandau 12 km, jarak dari pusat Pemerintahan Kota 2.800 km dan jarak ke dari Ibukota Provinsi 178 Km. Suhu maximum / minimum berkisaran 26°C dan bentuk wilayah datar berombak 75%.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan potensi yang sangat besar untuk melaksanaka pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk selalu bertambah dari waktu ke waktu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan sandang, pangan dan papan juga semakin meningkat. Di Desa Serai Wangi, dari segi jumlah penduduk, sebagian besar penduduknya adalah pendatang.

Penduduk Desa serai Wangi pada tahun 2021 adalah sebanyak 3049 jiwa dengan perincian jumlah 678 KK, laki – laki 1.549 jiwa dan perempuan 1.500 jiwa. Angka tersebut berbeda dengan jumlah awal penduduk sebenarnya yaitu sebanyak 300 KK

dan 1223 jiwa. Jadi per rasionya menunjukkan jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Selanjutnya dapat dilihat distribusi penduduk yang ada di Desa Serai Wangi menurut kelompok umur seperti tabel yang ada dibawah ini :

Tabel IV. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Desa Sera Wangi Tahun 2021

Desa	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Serai Wangi	Laki – Laki	1.549
	Perempuan	1.500
Jumlah		3049

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

Suku asli yang berada di Desa Serai Wangi pada umumnya adalah suku Melayu yang berasal dari penduduk asli setempat namun karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah sehingga banyak terdapat suku – suku lainnya, selanjutnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 2
Jumlah Penduduk Menurut Suku Di Desa Serai Wangi Tahun 2021

Desa	Penduduk Menurut Suku						Jumlah
Serai Wangi	Jawa	Melayu	Batak	Minang	Nias	Bugis	3049
Jumlah	1.359	878	582	158	27	45	

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

Lalu dari jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Desa Serai Wangi Tahun 2021 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel IV. 3
Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin
Desa Serai Wangi Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 -12	18	13	31
2	1 – 12	352	341	693
3	13 – 24	340	389	729
4	25 – 36	315	312	627
5	37 – 48	229	155	384
6	49 – 60	163	184	347
7	61 – 72	108	84	192
8	73 – 80	24	22	46
Jumlah		1559	1500	3049

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

4. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan tujuan bagi manusia untuk menguasai modal dasar pengetahuan yang diperlukan untuk perkembangan diri dan menimba ilmu pengetahuan sekaligus memahami tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Maka dari itu pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Pendidikan di Desa Serai cukup bagus. Sebagian besar masyarakat di desa ini telah menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi mendatang. Karena itu, banyak orang di desa ini menyekolahkan anaknya samapai ke perguruan tinggi. Meskipun masih ada masyarakat yang hanya pendidikannya hanya sampai SD dan (SMP/ sederajat). Untuk lebih jelas mengenai gambaran pendidikan ini maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Desa Serai Wangi Tahun 2021**

Desa	TK	SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	Tidak Lulus	Tidak Sekolah	Jumlah
Serai Wangi	60	600	345	280	35	271	740	112	2199

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa yang pendidikan tamatan SD memiliki jumlah yang paling banyak dan yang pendidikan pada perguruan tinggi D1 – D3 merupakan yang terendah.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mengembangkan dan meningkatkan wawasan masyarakat, sehingga diperlukan sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Selanjutnya sarana pendidikan di Desa Serai Wangi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 5

Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Serai Wangi

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	1
4	SMP	1
5	SMA	1
Jumlah		5

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana pendidikan yang berada di Desa Serai Wangi masih belum lengkap dikarenakan belum adanya sarana pendidikan untuk

sekolah menengah tingkat tinggi oleh karena itu untuk menempuh pendidikan tingkat tinggi anak – anak harus sekolah diluar desa Serai Wangi.

a. Kesehatan

Tabel IV. 6 Jumlah Fasilitas Kesehatan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat dua fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas dan posyandu untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan di Desa Serai Wangi.

b. Keagamaan

1. Keagamaan Desa Serai Wangi

Tabel IV. 7

Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Di Desa Serai Wangi Tahun 2021

Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
Serai Wangi	1116	10	13	-	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

Dilihat dari tabel diatas mayoritas penduduk Desa Serai Wangi yaitu beragama islam namun ada juga masyarakat sebagian masyarakat yang beraga Kristen dan Katholik.

2. Tempat Ibadah

Tabel IV.8 Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	8

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

Dilihat dari tempat ibadah yang tersedia maka dapat dipergunakan sebagai tempat pendidikan agama bagi masyarakat anak – anak, remaja maupun orang dewasa diluar pendidikan formal, dah juga menjadi tempat mengadakan kegiatan keagamaan lainnya.

3. Profesi dan mata pencaharian

Tabel IV. 9

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Di Desa Serai Wangi Tahun 2021**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Buruh Tani	120
2	PNS	8
3	Pengrajin	6
4	Pedagang	20
5	Bidan Swasta	1
6	Tukang Kayu	2
7	Karyawan Perusahaan Swasta	8
8	Belum Bekerja	15
9	Perangkat Desa	8
10	Buruh Harian Lepas	290
11	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	2
12	Tukang Jahit	5
13	Tukang Las	2
14	Anggota Legislatif	1
Jumlah		488

Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi Tahun 2022

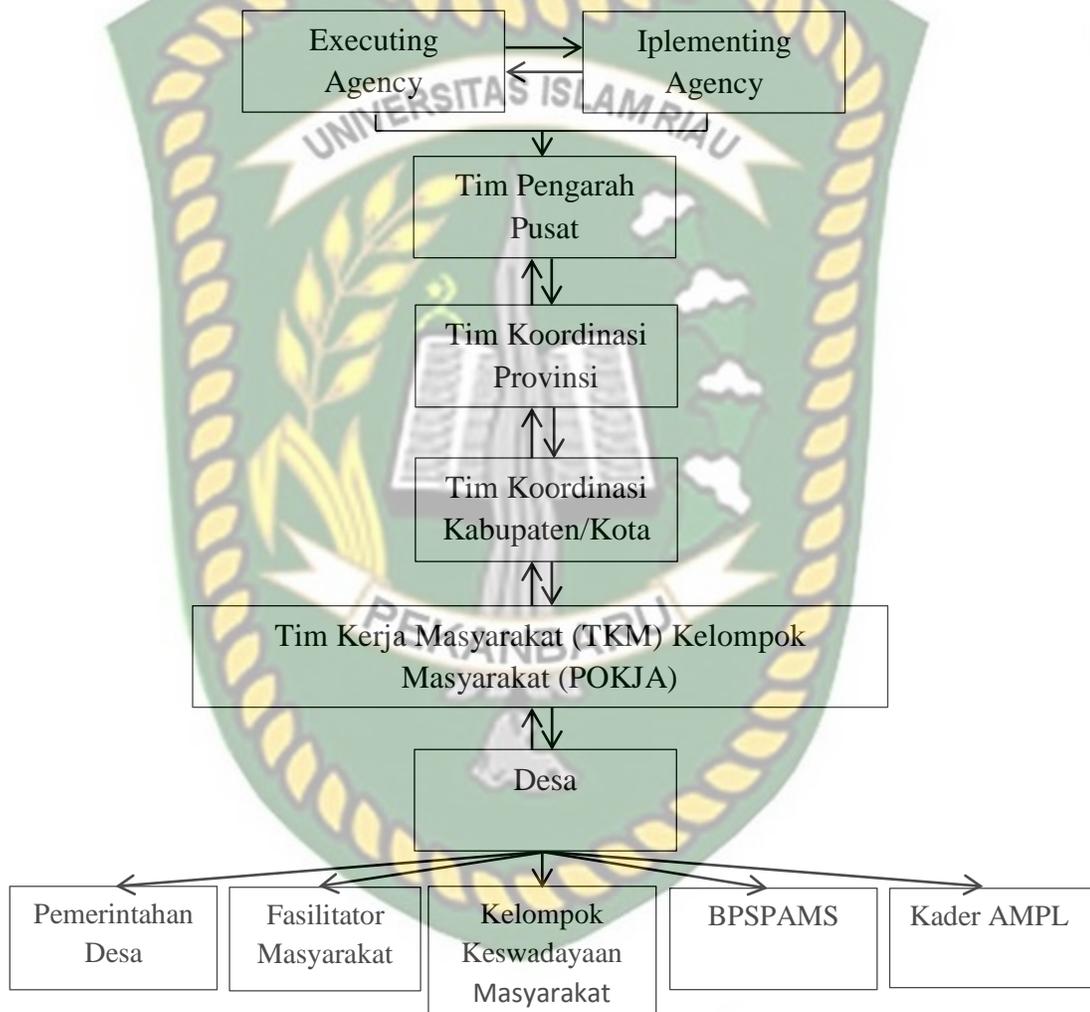
Dari tabel diatas dapat kita ketahui di Desa Serai Wangi mata pencaharian masyarakatnya yang paling banyak yaitu buruh harian lepas (BHL) sebesar 290 dikarenakan Desa Serai Wangi bersebelahan dengan PT. Arara abadi dan perkebunan masyarakat sebanyak 120 merupakan peringkat kedua berdasarkan mata pencaharian masyarakat.

B. Struktur Organisasi Pamsimas

PAMSIMAS dapat dilaksanakan dengan baik apabila proses pelaksanaannya mengikuti keseluruhan struktur organisasi pelaksanaan dari pusat hingga masyarakat, dengan melibatkan komponen pelaksana dan instansi terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan dari rencana PAMSIMAS, secara umum tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di pedesaan dan

pinggiran kota, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/ memberikan kehidupan yang sehat bagi masyarakat yang lestari dan adaptif Sarana dan prasarana air minum dan sanitasi masyarakat. Program tersebut akan menjadi model untuk mereplikasi, memperluas dan mengarusutamakan model ini di bidang lain dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Pelaksana Program Pamsimas



Sumber: Desa Serai Wangi

Executing Agency

Executing Agency (EA) Program Pamsimas adalah Direktorat Jendral Cipta Karya merupakan kementerian/lembaga nasional yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan.

Implementing Agency

Implementing Agency (IA) Program Pamsimas adalah Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah bertanggung jawab pada penyeenggaraan komponen pada program yang menjadi tanggung jawabnya.

Tim Pengarah Pusat

Yaitu Kelompok pengarah menggunakan kelompoknya yang sama dengan kelompok pengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang ditetapkan dengan SK. Tanggung jawab Panitia Pengarah sejalan dengan tanggung jawab Panitia Pengarah AMPL, antara lain: 1. Merumuskan rencana kebijakan pelaksanaan 2. Memberikan arahan kebijakan dan memberikan saran untuk perubahan kebijakan yang diperlukan selama pelaksanaan program Pamsimas

Tim Koordinasi Provinsi

Tim ini di bentuk berdasarkan Sk Gubernur, yang diketahui oleh Kepala Bappeprop, dan beranggotakan:

1. Dinas Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya
2. Dinas/Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat

3. Dinas Kesehatan
4. Instansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan

Tugas Tim koordinasi Provinsi

1. Mengkoordinasikan perencanaan/pelaksanaan kegiatan program Pamsimas di provinsi
2. Melakukan sosialisasikan program Pamsimas kepada Kabupaten/Kota
3. Melakukan analisa masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Pamsimas
4. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan Program
5. Memonitor kemajuan Program dan melaporkan kepada Gubernur dan pemerintah Provinsi. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program Pamsimas

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

Tim ini dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota yang diketahui penanggung jawab kepala Bappeda Kabupaten/Kota, antara lain: Dinas PU/Sepadannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat/Sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Dan instansi terkait.

Tugas tim koordinasi Kabupaten/Kota:

1. Mensosialisasikan program Pamsimas kepada masyarakat

2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program Pamsimas di Kabupaten/Kota
3. Menetapkan desa sasaran program
4. Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
5. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Pamsimas
6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program diwilayahnya
7. Menanggulangi berbagai ragam masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan
8. Memonitor kemajuan perogram Paamsimas dan melaporkan kepada Bupati/Walikota dan Pemerintah Provinsi, agar selalu memberikan dukungan
9. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program.

Tim Kerja Masyarakat

Tim Kerja Masyarakat (TKM) yaitu terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender dalam melaksanakan kegiatan program. Pemilihan serta pembentukan TKM akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan proses MPA/PHAST yang dilakukan di desa. Dimana TKM tidak boleh menerima upah dari kegiatan yang dilaksanakannya untuk tingkat desa. TKM ini diperkuat oleh SK Bupati/Walikota.

Desa

Unit utama di tingkat desa adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Satuan/Unit Pelaksana kegiatannya (Village Implementation Team) di desa yang sedang dan telah dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah seperti P2KP yang telah membentuk BKM tidak perlu membentuk LKM baru, cukup

dengan memanfaatkan BKM sesuai dengan karakteristiknya sebagai LKM. Dalam hal BKM memiliki kinerja yang kurang memadai, maka TFM bersama-sama dengan mitra setempat melakukan revitalisasi kelembagaan tersebut.

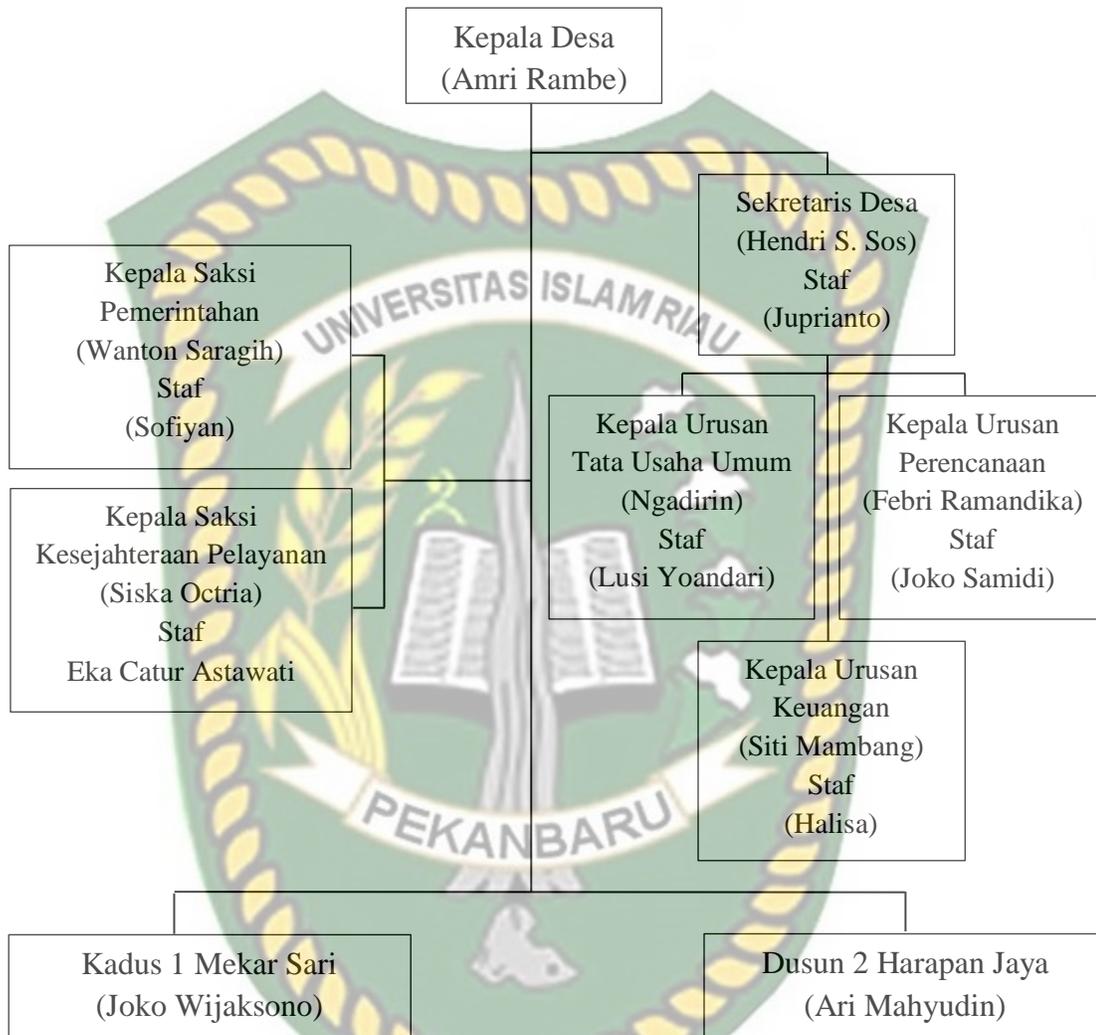
Di lokasi yang belum terdapat BKM atau sejenisnya, maka dapat dibentuk lembaga baru yakni LKM yang berfungsi sebagai dewan masyarakat. Proses pembentukan LKM sesuai dengan asas representative, partisipatif, akuntabel dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, dengan kriteria anggota yang lebih mengutamakan track record atau kepercayaan masyarakat dan menjamin keterlibatan perempuan serta warga miskin.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Serai Wangi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan dari Pemerintah Pusat yang berperan untuk mengatur daerahnya dan masyarakat di Desa tersebut.



Gambar IV. 2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Serai Wangi



Sumber: Kantor Kepala Desa Serai Wangi 2022

D. Fungsi dan Tugas Organisasi

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat dan dijadikan seorang pemimpin dan mengatur/mengurus kepentingan – kepentingan masyarakat

berdasarkan dari adat istiadat yang diakui dan dihormati masyarakat dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Tugas Kepala Desa :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, penataan dan pengelolaan wilayah, melaksanakan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan bagi msyarakat dan penetapan peraturan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan yaitu membangun sarana prasarana Desa seperti dibidang kesehatan, olahraga dan pendidikan
3. Pembinaan Kemasyarakatan yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masyarakat, sosial budaya masyarakt, keagamaan dan partisipasi masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf bagi Kepala Desa dibidang adminitrasi pemerintahan Desa dan bertugas membantu dalam bidang administrasi Desa.

Tugas Sekretaris Desa:

Membantu Desa dalam melaksanakan segala tugasnya, pengurusan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dibidang ketatausahaan seperti surat menyurat, urusan umum seperti penyediaan prasarana perangkat desa, perjalanan dinas dan pelayanan umum, investasi, penyiapan rapat, urusan perencanaan seperti penyusunan laporan, menyusun anggaran dan pendapatan Desa, monitoring dan

evaluasi dan urusan keuangan seperti administrasi sumber pengeluaran dan pendapatan Desa,

3. Kepala Saksi Pemerintahan

Tugas Kepala Saksi Pemerintahan:

Membantu Kepala Desa maupun Sekretaris dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa seperti menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengelolaan administrasi pertanahan dan kependudukan, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan menjadi pelaksana tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini penulis disampaikan dengan bahasa yang komunikatif sehingga dapat difahami. Dalam proses wawancara oleh penulis dengan informan, penulis menyampaikan jawaban tanggapan informan dengan pertanyaan – pertanyaan sesuai terhadap indikator penelitian. Kemudian hasil observasi penulis mengelola fenomena menjadi sebuah informasi dan mendokumentasikannya kedalam bagian skripsi.

A. Identitas informan

Informasi dari identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilaksanakan penulis. Sesuai dengan penelitian membutuhkan 5 orang narasumber.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini penulis menentukan informan dan key informan yaitu Kepala Desa Serai Wangi, Ketua BPSPAMS, Fasilitator Masyarakat, serta 2 orang masyarakat Desa Serai Wangi.

Tabel V.1 Identitas informan penelitian tentang peranan BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Amri Rambe	49	Laki – laki	SMA Sederajat	Wiraswasta
2	Ponidi	62	Laki – laki	SMP Sederajat	Petani
3	Wagimin	43	Laki – laki	SD Sederajat	Petani
4	Nurhayati	39	Perempuan	SD Sederajat	IRT
5	Herianto	43	Laki - laki	SD Sederajat	Pedagang

Suber: Data Olahan Peneliti 2022

Dari tabel diatas yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Bapak Ponidi selaku Ketua BPSPAMS dalam Pamsimas di Desa Serai Wangi kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Amri Rambe selaku Kepala Desa Serai Wangi, Bapak Wagimin selaku fasilitator masyarakat Desa Serai Wangi, Ibu Nurhayati dan Bapak Herianto selaku masyarakat Desa Serai. Dengan bebrapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan diatas, Ketua BPSPAMS sebagai key informan dianggap mampu dan memahami oleh peneliti dalam memberikan informasi serta jawaban yang dibutuhkan bagi peneliti sesuai indikator yang digunakan. Kemudian Kepala Desa dan informan yang telah disebutkan juga merupakan bagian penting juga dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

B. Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Dalam Menjalankan Pamsimas ada norma – norma yang harus dijalankan oleh setiap lapisan pengelola dan masyarakat dimana dalam menjalankan Program Pamsimas tentunya harus ada norma –norma yang harus ditaati baik oleh pengelola Pamsimas maupun masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dimana setiap norma tersebut harus ditaati agar Pamsimas yang ada terus berjalan demi kemakmuran masyarakat Desa.

Untuk melihat Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas Di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis penulis menggunakan indikator peranan menurut Soerjono Soekanto Yaitu: Norma – norma, Individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Untuk melihat norma – norma yang di maksud dari penelitian ini penulis turunkan dari beberapa sub indikator Yaitu:

1. Norma – Norma

Norma berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan dalam bermasyarakat maka norma pada dasarnya dibentuk untuk dilaksanakan. Jika norma tidak dilaksanakan didalam bermasyarakat, maka tatanan di dialam masyarakat akan

kacau karena tidak adanya aturan yang mengikat dan berlaku. Menurut Antony Giddens (1994) yaitu sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkrit yang harus di perhatikan oleh setiap masyarakat.

Untuk melihat norma – norma yang dimaksud dari penelitian ini penulis turunkan dari beberapa sub indikator yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ponidi selaku Ketua BPSPAMS, mengenai indikator Norma – norma tentang bagaimana menurut bapak tentang adanya aturan yang mengatur Program Pamsimas di Desa Serai Wangi? Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai aturan – aturan sejauh ini selaku pengelola Pamsimas sudah sama – sama memahami dan menjalankan Pamsimas sesuai aturan – aturan yang ada serta mengeluarkan persyaratan untuk masyarakat yang ingin menyalur air harus membayar iuran perbulan sebagai modal untuk pemeliharaan dan perawatan Pamsimas”. (Bapak Ponidi, Ketua BPSPAMS, Kamis 9 September 2021 pukul 19.16)

Selanjutnya mengenai bagaimana menurut bapak tentang adanya SOP pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi? Beliau mengatakan bahwa:

“mengenai SOP atau manajemen kerja para pengelola pamsimas sudah melaksanakan sesuai panduan SOP karena para anggota pengelola Pamsimas sudah dibekali buku juknis Pamsimas dan mengerjakan atau mengelola Pamsimas sesuai aturan dan panduan dari buku juknis yang telah ada.”. (Bapak Ponidi, Ketua BPSPAMS, Kamis 9 September 2021 pukul 19.16)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Amri Rambe selaku Kepala Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut bapak tentang adanya aturan yang mengatur Program Pamsimas di Desa Serai Wangi? Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai aturan untuk Pamsimas, Pamsimas bersifat independen Desa hanya bersifat pemantauan, pengawasan dan kontrol jadi Desa terpisah dari Pamsimas sehingga Desa tidak terlalu jauh mengetahui sistem yang ada di pamsimas baik sistem keuangannya dan sistem regulasinya tetapi menurut pendapat saya pengelolaan Pamsimas ini harusnya sudah melaksanakan pengelolaan Pamsimas sesuai aturan – aturan yang berlaku karena mereka dibekali buku panduan pelaksanaan Pamsimas dan arahan dari pusat.”. (Bapak Amri Rambe, Kepala Desa Serai Wangi, Senin 4 Oktober 2021 Pukul 10.05)

Selanjutnya mengenai bagaimana menurut bapak tentang adanya SOP pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi? Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai masalah SOP Desa Tidak mengetahui seperi apa SOP yang ada pada Pamsimas tetapi kami hanya melihat sepiintas dan penjelaan – penjelasan dari pendamping Desa seperti apa manajemen kerja Pamsimas namur Desa tidak mengetahui lebih mengenai SOP dari Pamsimas ini karena sifatnya terpisah dari Desa secara regulasi.”. (Bapak Amri Rambe, Kepala Desa Serai Wangi, Senin 4 Oktober 2021 Pukul 10.05)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi tentang indikator norma – norma yaitu

- a. Mengenai adanya aturan yang mengatur Program Pamsimas di Desa Serai Wangi yaitu BPSPAMS sudah menjalankan norma – norma sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang sudah ditetapkan.
- b. Mengenai adanya SOP pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi yaitu BPSPAMS menjalankan SOP dan arahan yang ada di dalam buku panduan Pamsimas tetapi pada pertengahan pengelolaan terjadi beberapa kendala seperti kehilangan mesin yang akhirnya menyebabkan Pamsimas tidak berjalan dengan baik.

Berikut ini hasil observasi dilapangan ditemukan pada tabel berikut :



Tabel V. 2 Hasil Observasi Terkait Indikator Norma – norma

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Observasi mengenai Norma – norma dan SOP Pengelolaan Pamsimas
2	Waktu Kegiatan	Kamis 9 September 2021 pukul 19.16 Senin 4 Oktober 2021 pukul 10.05
3	Tempat Kegiatan	Desa Serai Wangi
4	Aktor Yang Terlibat	Ketua BPSPAMS Kepal Desa Serai Wangi Fasilitator Masyarakat Masyarakat Pengguna
5	Hasil Observasi	Mengenai Norma – norma dan SOP, BPSPAMS sudah mengelola Pamsimas sesuai dengan aturan – aturan yang sudah ditetapkan didalam buku panduan Pamsimas.

Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2022

2. Individu Masyarakat Dalam Organisasi

Peranan individu masyarakat dalam organisasi di dalam pengelolaan Pamsimas sangat berpengaruh karena dimana setiap individu pasti mempunyai kemampuan dalam mengelola Pamsimas. Kemampuan (ability) merujuk pada kapasitas individu untuk mengerjakan tugas – tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan seseorang individu pada hakikatnya tersusun berdasarkan dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2002)

Kemampuan dari seseorang akan menentukan perilaku dan hasil dari suatu pekerjaan. Arti dari kemampuan (abilities) adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan secara fisik atau mental yang diperoleh sejak lahir, belajar dan dari pengalaman (Soehardi, 2003). Setiap orang memiliki kekurangan atau kelebihan dalam hal kemampuan yang menentukan unggul atau rendahnya

seseorang dalam melakukan tugas. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam melaksanakan pekerjaan atau penilaian terhadap apa yang bisa dilakukan seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ponidi selaku Ketua BPSPAMS, mengenai bagaimana menurut bapak tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas?

“mengenai tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas para pengelola kurang mampu karena ditengah pengelolaan pengaliran air Pamsimas itu terkendala sebab Desa Serai Wangi ini bentuk datarannya tidak rata jadi ada rumah yang di tanjakan dan di turunan karna itu air yang dialirkan tidak normal terlebih di bagian rumah yang berada di dataran tinggi akan tetapi para pengelola berusaha merespon mengenai kendala tersebut namun kesulitan juga terkendala oleh biaya sebab banyak masyarakat yang tidak membayar atau telat membayar iuran perbulan dan Pamsimas kita ini juga kehilangan mesin utama (dong feng) dan disitu BPSPAMS berinisiatif untuk menyalurkan langsung mesin air melalui PLN tetapi tidak lama dari itu Pamsimas kehilangan satu mesin air yang membuat para pengelola menjadi diam dan lepas tangan juga tidak ada laporan ke pusat dan menyebabkan Pamsimas tidak berjalan dengan baik”.

(Bapak Ponidi, Ketua BPSPAMS, Kamis 9 September 2021 pukul 19.16)

Selanjutnya bagaimana menurut bapak mengenai transparansi pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“untuk tranparansi dalam pengelolaan pamsimas cukup baik kaerena BPSPAMS membuka akses kepada semua pihak terutama masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar pamsimas contohnya seperti penempelan pengumuman di papan2 di tempat2 umum seperti laporan keluar masuknya dana dan penyebaran informasi uang bulanan seputar pamsimas secara berkala.”.

(Bapak Ponidi, Ketua BPSPAMS, Kamis 9 September 2021 pukul 19.16)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Amri Rambe selaku Kepala Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut bapak tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas?

“mengenai tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas ini kontradiksi sementara Desa tidak terlalu ikut mencampuri program Pamsimas jadi Desa hanya dapat menilai kemampuan para pengelola kurang memahami sebab dapat dilihat Pamsimas Desa Serai Wangi ini tidak berjalan lagi dan sekilas juga kami hanya melihat kerja para pengelola, hanya kerja fisiknya saja atau kerja dilapangan akan tetapi mengenai administrasi Desa tidak tau lebih jauh”. (Bapak Amri Rambe, Kepala Desa Serai Wangi, Senin 4 Oktober 2021 Pukul 10.05)

Selanjutnya bagaimana menurut bapak mengenai transparansi pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Mengeni transparansi sebelumnya Program Pamsimas memang sudah ada melakukan musyawarah antara Desa para pengelola dan masyarakat, Pamsimas membentuk sistem uang bulanan bagi penyaluran pamsimas ke masyarakat, pekerja seperti KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) yang mereka hanya bekerja dan BPSPAMS ini adalah induk atau pengelola jadi setelah dikerjakan oleh KKM Pamsimas akan diserahkan kepada BPSPAMS untuk kedepannya penyaluran ke masyarakat namun selama berjalannya pamsimas desa tidak ada mendapatkan informasi langsung dari pengelola pamsimas mengenai administrasi baik dana masuk dan dana yang dikeluarkan pamsimas, jadi mengenai transparansi belum transparan”. (Bapak Amri Rambe, Kepala Desa Serai Wangi, Senin 4 Oktober Pukul 10.05)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Wagimin selaku fasilitator masyarakat Serai Wangi mengenai bagaimana menurut bapak tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas?

“mengenai tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas menurut saya kurang mampu sebab banyaknya masyarakat penyalur yang protes akibat seringnya mesin mati dan penyaluran yang tidak stabil dan banyaknya masyarakat yang ingin menyalur air tetapi belum juga dapat menyalur air dari Pamsimas”. (Bapak Wagimin, Fasilitator Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 16.10)

Selanjutnya bagaimana menurut bapak mengenai transparansi pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Mengenai transparansi BPSPAMS sudah transparansi kepada Desa dan Masyarakat kerana telah dilakukan musyawarah dan pembentukan pekerja untuk Pamsimas dan pembayaran perbulan bagi penyalur air dari Pamsimas”. (Bapak Wagimin, Fasilitator Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 16.10)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Ibu Nurhayati selaku masyarakat Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut Ibu tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas?

“mengenai tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas menurut saya kurang mampu sebab banyaknya masyarakat penyalur yang protes akibat pengaliran air yang tidak stabil dan perbaikan yang lama jika terjadi kerusakan juga banyaknya masyarakat yang ingin menyalur air tetapi belum juga dapat menyalur air dari Pamsimas”. (Ibu Nurhayati, Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 08.44)

Selanjutnya bagaimana menurut Ibu mengenai transparansi pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“BPSMPASM sudah transparansi terhadap masyarakat seperti telah dilakukannya musyawarah mengenai pembentukan pekerja dan penyebaran

informasi seputar perkembangan Pamsimas setiap bulannya". (Ibu Nurhayati, Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 08.44)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Herianto selaku masyarakat Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut Bapak tentang kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas?

"menurut saya mengenai kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas kurang mampu sebab saya sebagai masyarakat penyalur kurang puas dalam mendapatkan pengaliran air dari situ juga saya yang menyalur merasa rugi jika membayar penuh uang iuran yang telah ditetapkan oleh pengelola Pamsimas dan banyaknya masyarakat yang ingin menyalur air tetapi belum juga dapat menyalur air dari Pamsimas". (Herianto, Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 09.40)

Selanjutnya bagaimana menurut Bapak mengenai transparansi pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi?

"BPSMPASM sudah transparansi terhadap masyarakat walaupun tidak rutin seperti penyebaran informasi seputar perkembangan Pamsimas setiap bulannya dan pemberitahuan kerusakan atau perbaikan pada Pamsimas". (Herianto, Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 09.40)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi tentang indikator individu masyarakat dalam organisasi yaitu:

- a. Mengenai kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas yaitu Kemampuan BPSPAMS sangat terbatas karena beberapa hal menjadi kendala para pengelola dalam menjalankan Pamsimas seperti struktur tanah yang tidak rata dan lambatnya respon para pengelola terhadap keluhan masyarakat.
- b. mengenai transparansi pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Yaitu transparansi BPSPAMS mengenai perkembangan Pamsimas cukup baik seperti yang diketahui BPSPAMS rutin setiap bulanya mengeluarkan pengumuman serta laporan keluar masuknya dana dalam pengelolaan Pamsimas.

Berikut ini hasil observasi dilapangan ditemukan pada tabel berikut :



Tabel V.3 Hasil Observasi Terkait Indikator Individu Masyarakat Dalam Organisasi

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Observasi mengenai Kemampuan dan Transparansi Pengelola Pamsimas
2	Waktu Kegiatan	Kamis 9 September 2021 pukul 19.16 Senin 4 Oktober 2021 pukul 10.05 Sabtu 5 September 2021 pukul 09.40
3	Tempat Kegiatan	Desa Serai Wangi
4	Aktor Yang Terlibat	Ketua BPSPAMS Kepal Desa Serai Wangi Fasilitator Masyarakat Masyarakat Pengguna
5	Hasil Observasi	Untuk kemampuan para BPSPAMS Dalam menjalankan Pamsimas kurang baik sebab banyak masyarakat yang kurang puas dengan hasil kerja pengelola namun hambatan pengelola disebabkan karena struktur tanah Desa Serai Wangi yang tidak rata meyebabkan air yang masuk kerumah – rumah tidak berjalan dengan baik dan kurangnya dana namun mengenai transparan BPSPAMS cukup baik karena terbuka kepada masyarakat mengani Pelaksanaan dan Pengelolaan Pamsimas.

Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2022

3. Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat

Selain dari norma – norma dan individu masyarakat dalam organisasi selanjutnya individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktur sosial adalah salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Secara umum struktur sosial pada keteraturan dalam kehidupan sosial, penerapannya tidak konsisten. Struktur sosial kadang juga

didefinisikan sebagai hubungan sosial yang terpola, aspek – aspek reguler dan berulang dari interaksi dari anggota sosial tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ponidi selaku Ketua BPSPAMS, mengenai bagaimana menurut bapak tentang respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Di awal pengelolaan Pamsimas menurut saya selaku ketua respon bspams dalam mengelola pamsimas cukup baik karena BPSPAMS telah menjalankan dan mengembangkan sarana tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ada dan BPSPAMS juga cepat tanggap dalam mengatasi kerusakan mesin atau kebocoran pipa serta menerima kritik dan saran dari masyarakat”. (Bapak Ponidi, Ketua BPSPAMS, Kamis 9 September 2021 pukul 19.16)

Selanjutnya Bagaimana menurut bapak tentang respon masyarakat terhadap Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Respon masyarakat terhadap Pamsimas sangat tinggi karena masyarakat Desa Serai Wangi ini lebih banyak menyalur air dari satu orang jadi dengan adanya Program Pamsimas ini masyarakat bisa mendapatkan air lebih mudah tanpa harus antri untuk menyalurkan air karena sudah disalurkan kerumah - rumah dan kapasitas penampung juga cukup besar”. (Bapak Ponidi, Ketua BPSPAMS, Kamis 9 September 2021 pukul 19.16)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Amri Rambe selaku Kepala Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut bapak tentang respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“menurut saya selaku Kepala Desa respon BPSPAMS dalam mengelola pamsimas cukup baik karena BPSPAMS telah menjalankan dan mengembangkan sarana tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ada walaupun ada sedikit kekurangan dalam pengelolaan Pamsimas”. (Bapak Amri Rambe, Kepala Desa Serai Wangi, Senin 4 Oktober 2021 Pukul 10.05)

Selanjutnya Bagaimana menurut bapak tentang respon masyarakat terhadap Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Respon masyarakat terhadap Pamsimas sangat tinggi apalagi daerah Desa Serai Wangi ini termasuk sulit mendapatkan air karena susah mendapatkan sumber air walaupun dilakukan pengeboran dan dapat dilihat juga banyak masyarakat yang mendaftar untuk menyalur melalui pamsimas”. (Bapak Amri Rambe, Kepala Desa Serai Wangi, Senin 4 Oktober 2021 Pukul 10.05)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Wagimin selaku Fasilitator Masyarakat Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut bapak tentang respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“ respon BPSPAMS dalam mengelola pamsimas cukup baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kendala dalam menjalankan pamsimas didaerah

yang permukaan tanahnya tidak rata sehingga membutuhkan waktu untuk dapat melakukan pemerataan penyaluran ke setiap rumah masyarakat yang mendaftar ke pamsimas, itu salah satu penyebab keterbatasan BPSPAMS dalam merespon keluhan masyarakat. Maka dari itu BPSPAMS juga rutin memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai keadaan atau kendala yang terjadi di pamsimas sebagai bentuk transparansi BPSPAMS kepada masyarakat dalam mengelola pamsimas". (Bapak Wagimin, Fasilitator Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 16.10)

Selanjutnya Bagaimana menurut bapak tentang respon masyarakat terhadap Pamsimas di Desa Serai Wangi?

"Respon masyarakat terhadap Program Pamsimas sangat tinggi karena harusnya masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya Program Pamsimas ini karena situasi sumber air yang terbilang sulit karena harus mengantri untuk mendapatkan air terlebih perumahan yang berada di pasar yang berdempetan sehingga harus menyalur ke satu orang yang memiliki sumur bor". (Bapak Wagimin, Fasilitator Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 16.10)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Ibu Nurhayati selaku Masyarakat Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut ibu tentang respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“ Menurut saya respon BPSPAMS dalam mengelola pamsimas kurang baik, karena terlihat dari usahanya untuk pemerataan penyaluran ke setiap rumah masyarakat cukup lama.walaupun semua berita terbaru mengenai pamsimas rutin diumumkan setiap bulannya dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan tetapi masyarakat lebih senang apabila setiap keluhan dapat langsung direpson oleh para pengelola”. (Ibu Nurhayati, Masyarakat,Minggu 5 September 2021 Pukul 08.44)

Selanjutnya Bagaimana menurut Ibu tentang respon masyarakat terhadap Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Saya selaku masyarakat Desa Serai Wangi terbantu sekali dengan adanya Program Pamsimas walaupun terdapat kekurangan di dalam Program Pamsimas ini namun karena situasi sumber air di Desa Serai Wangi ini yang terbilang sulit karena rumah – rumah yang rapat dan yang memiliki sumur bos yang sedikit menyebabkan banyak masyarakat yang menyalur dan karena banyaknya masyarakat yang menyalur air menyebabkan kekurangan air”. (Ibu Nurhayati, Masyarakat,Minggu 5 September 2021 Pukul 08.44)

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Herianto selaku Masyarakat Desa Serai Wangi mengenai bagaimana menurut Bapak tentang respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“ mengenai respon BPSPAMS menurut saya dalam mengelola pamsimas kurang baik, karena terlihat dari usahanya untuk pemerataan penyaluran ke setiap rumah masyarakat tidak terpenuhi dan apabila terjadi kebocoran atau air tidak berjalan para pengelola terlalu lambat dalam menangani kerusakan yang terjadi”. (Bapak Herianto, Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 09.40)

Selanjutnya Bagaimana menurut Bapak tentang respon masyarakat terhadap Pamsimas di Desa Serai Wangi?

“Menurut saya Desa Serai Wangi sangat terbantu dengan adanya Program Pamsimas walaupun air yang dialirkan kerumah – rumah masih tidak stabil dan respon para pengelola yang lambat tetapi masyarakat masih bisa mendapatkan air”. (Bapak Herianto, Masyarakat, Minggu 5 September 2021 Pukul 09.40)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi tentang indikator individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat yaitu:

- a. Mengenai tentang respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas di Desa Serai Wangi Yaitu respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas, beberapa pihak mengatakan respon BPSPAMS cukup baik dilihat dari hasil kinerja para pengelola dalam menjalankan Pamsimas namun tidak menutup kemungkinan adanya keterbatasan para pengelola dalam menjalankan Pamsimas seperti

pendapat ibu Nurhayati dan Bapak Herianto yang kurang puas dengan respon BPSPAMS yang cukup lama dalam menanggapi keluhan masyarakat.

- b. Mengenai tentang respon masyarakat terhadap Pamsimas di Desa Serai Wangi Yaitu respon masyarakat terhadap Pamsimas cukup baik karena merasa terbantu dengan adanya ketersediaan air bersih yang disalurkan langsung dialirkan kerumah rumah masyarakat.

Berikut ini hasil observasi lapangan ditemukan pada tabel berikut :



Tabel V.4 Hasil Observasi Terkait Indikator Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Observasi mengenai respon BPSPAMS terhadap Pamsimas dan respon masyarakat terhadap Pamsimas
2	Waktu Kegiatan	Kamis 9 September 2021 pukul 19.16 Senin 4 Oktober 2021 pukul 10.05 Minggu 5 September 2021 pukul 09.40
3	Tempat Kegiatan	Desa Serai Wangi
4	Aktor Yang Terlibat	Ketua BPSPAMS Kepal Desa Serai Wangi Fasilitator Masyarakat Masyarakat Pengguna
5	Hasil Observasi	Untuk respon BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas beberapa pihak mengatakan cukup baik namun ada juga yang mengatakan kurang baik namun penyebab lambatnya pekerja dalam memperbaiki kerusakan yang ada disebabkan stuktur tanah yang tidak rata dan kurangnya dana dan mengenai respon masyarakat mengenai adanya Pamsimas Yaitu respon masyarakat terhadap Pamsimas cukup baik karena merasa terbantu dengan adanya ketersediaan air bersih yang disalurkan langsung dialirkan kerumah rumah masyarakat.

Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2022

C. Faktor – faktor penghambat dalam Peranan BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan faktor – faktor penghambat dalam Peranan BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Untuk itu penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Ponidi selaku Ketua BPSPAMS pada hari

kamis 19 September 2021 pukul 19.16 WIB. Bahwa apa saja yang menjadi penghambat Peranan BPSPAMS Dalam Mengelola Pamsimas yaitu Bapak Ponidi mengatakan :

1. Kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas terkendala karena struktur tanah Desa Serai Wangi yang tidak rata ada rumah yang berada di dataran tinggi dan rumah yang berada di dataran rendah mengakibatkan pengaliran air yang tidak stabil terlebih ke rumah yang berada di dataran tinggi sudah berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak juga terselesaikan akibat dana yang kurang.
2. Keberlanjutan pengelolaan Pamsimas terkendala akibat hilangnya mesin dong feng dan mesin air (sanyo) akibat hilangnya mesin ini pengelolaan Pamsimas tidak berjalan dengan baik banyak pengelola Pamsimas yang sudah jenuh untuk menjalankan Pamsimas dari situ mengakibatkan juga masyarakat protes dan enggan dan suka telat dalam membayar iuran perbulan Pamsimas.
3. Minimnya anggaran yang menghambat perbaikan dan perawatan Pamsimas karena minimnya anggaran menyebabkan kesulitan untuk para pengelola dalam melakukan keberlanjutan Pamsimas dan sudah dilakukan pelaporan untuk bantuan dana keberlanjutan Pamsimas kepada Kabupaten namun belum ada juga bantuan yang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan BPSPAMS dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, Peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran – saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari peneliti ini adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka Peranan BPSPMAS Dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sudah baik namun belum optimal dan maksimal terhadap pengelolaan mengingat disebabkan struktur tanah yang tidak rata dan anggaran.
2. Dari hasil penelitian juga ditemukan beberapa hambatan – hambatan dalam Peranan BPSPAMS Dalam Pengelolaan Pamsimas di Desa Serai wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, dimana hambatan tersebut adalah :
 - a. Kemampuan BPSPAMS dalam mengelola Pamsimas terkendala karena struktur tanah Desa Serai Wangi yang tidak rata ada rumah yang berada di

dataran tinggi dan rumah yang berada di dataran rendah mengakibatkan pengaliran air yang tidak stabil terlebih ke rumah yang berada di dataran tinggi

- b. Keberlanjutan pengelolaan Pamsimas terkendala akibat hilangnya mesin dong feng dan mesin air (sanyo)
- c. Minimnya anggaran yang menghambat perbaikan dan perawatan Pamsimas

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu Peranan BPSPAMS dalam pengelolaan Pamsimas di Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, terdapat beberapa kendala dengan adanya kendala-kendala penulis akan memberikan saran terhadap Pelaksanaan Program Pamsimas, adapun saran dari penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah selaku pembuat kebijakan hendaknya lebih mengawasi program ini dengan serius, karena dengan adanya Program ini berpengaruh cukup positif dikalangan masyarakat dan pemerintah terutama bagi masyarakat yang membutuhkan air atau kesulitan akan air bersih.
2. Mengenai struktur tanah di Desa Serai Wangi yang menyebabkan air tidak berjalan normal pengelola Pamsimas dengan cara membangun beberapa menara penampung air di bagian dataran yang lebih tinggi sehingga pengambilan air tidak hanya pada satu menara penampung air saja. Dan Pengelola program Pamsimas perlu mengajukan bantuan pendanaan kepada

pemerintah untuk pembangunan sarana air minum Pamsimas, sehingga Program Pamsimas akan akan berjalan secara berkelanjutan, hal ini akan mempermudah bagi masyarakat untuk mengakses air bersih.

3. Diharapkan kepada pengelola Pamsimas dan anggota Pamsimas agar selalu bekerjasama dalam hal pengawasan, pengelola organisasi hendaknya membagi anggota organisasi tugas-tugas dalam hal pengawasan pamsimas agar pengelolaan pamsimas dapat berjalan dengan baik.
4. Adanya kesepakatan dengan masyarakat pengguna Pamsimas mengenai peraturan yang mengatur tentang pembayaran iuran perbulan, apabila ada masyarakat yang tidak membayar atau terlambat akan dikenakan sanksi sesuai yang disepakati, hal ini untuk memudahkan pihak pengelola Pamsimas dalam pengoperasian dan pemeliharaan agar Pamsimas dapat dirasakan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gulo, W. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hasibuan, Melayu Sp. 2004. *Manajemen "Edisi Revisi"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Harmaily. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti".
- Kencana, Syafiee Inu. 2003. *Sistem Administrasi Neagara*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Kencana, Syafiee Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Kencana, Syafiee Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Giroth, lexie Mm 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia Indrapura*.
- Maryati, Kun. 2007. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Esis.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcolas, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: PT Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiolog Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, J. Nugroho. 2003. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tangkisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip - Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wayong. 2009. *Asas Dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan.
- Wirman, Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinongor: PT Gelora Aksara Pratama.
- Yusnani. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins, P. Stephen. 2002. *Prinsip - Prinsip Perilaku Organisasi. Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Sigit, Soehardi. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Terbit Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.

Skripsi

- Muttofi'ah, S., Hidayati, R., & Hartono, S. (2020). *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)(Studi Desa Sei*

Toman, Kec. Mendahara Ulu) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Ilma, N. I. (2019). *Manajemen keuangan pada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Mega Salpiana (2015). *Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*.

Trijunianto, O. (2016). *Analisis Faktor keberlanjutan Sarana Air Minum Program Pamsimas di Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

Lestari, D. (2016). *Kontribusi Program Pamsimas Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tingkat Rumah Tangga di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Dokumentasi

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keberlanjutan Program PAMSIMAS Oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Kelompok Keswadayaan Masyarakat Dan Penyediaan Dana *Sharing* Untuk Program Hibah Khusus PAMSIMAS Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pedoman Umum Program Pamsimas 2016

Petunjuk Teknis Penguatan Keberlanjutan Program Pamsimas 2013